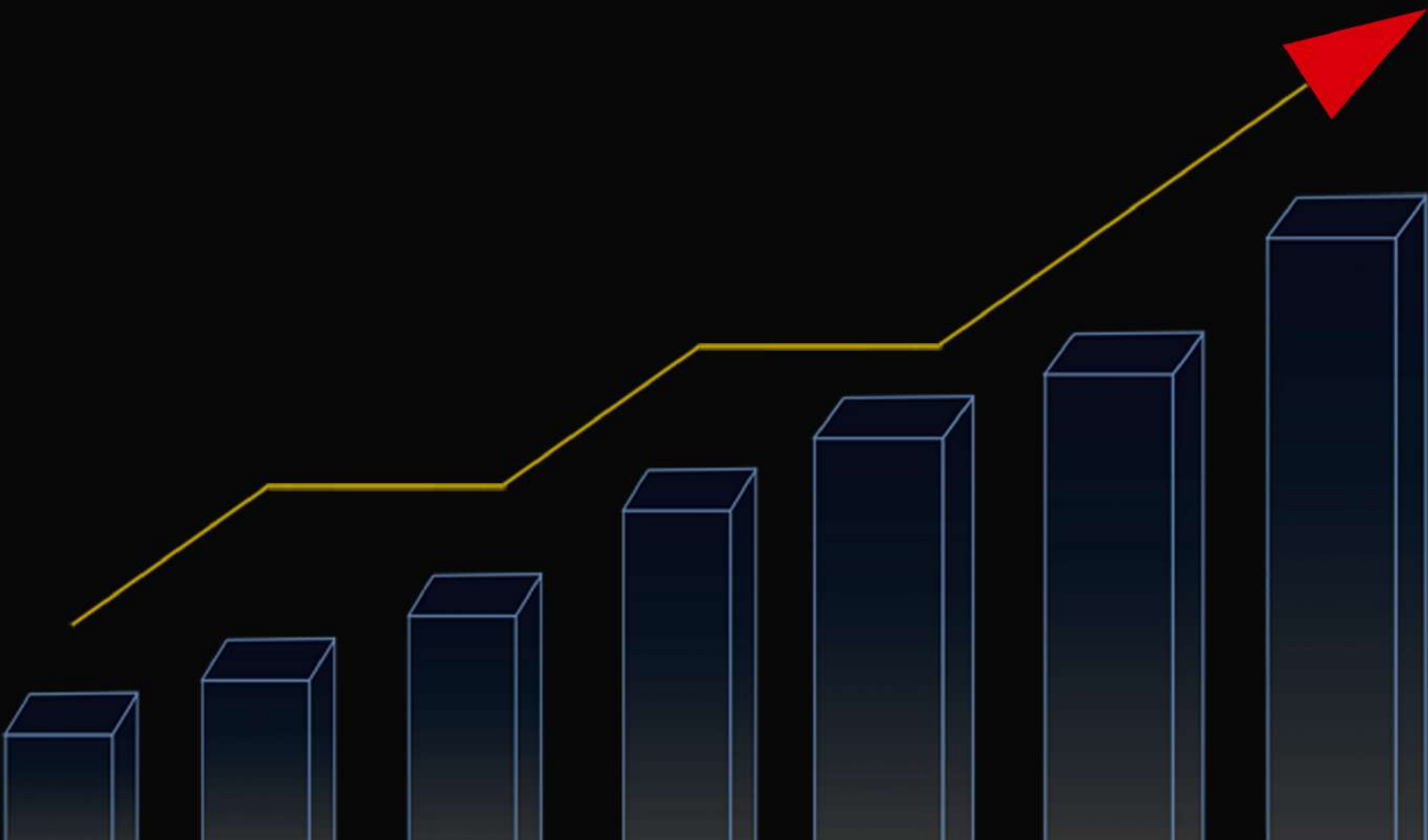




KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

*Potret Keberhasilan
Program Prioritas
Tahun 2015-2018*





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Jalan M.H Thamrin No. 08 Jakarta Pusat 10340



+6221-23951100



Kemenko Bidang Kemaritiman



+6221-3141790



kemenkomaritim



biroinfokum@maritim.go.id



kemaritiman



maritim.go.id



Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman RI

ISBN 978-623-90276-0-5



9 786239 027605



Panorama Pulau Kura
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

**POTRET KEBERHASILAN
PROGRAM PRIORITAS
TAHUN 2015-2018**

**BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

POTRET KEBERHASILAN
PROGRAM PRIORITAS
TAHUN 2015-2018

Pengarah:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan

Penanggung Jawab:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman Agus Purwoto
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan
Jasa Agung Kuswandono
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya
Maritim Safri Burhanuddin

Penyunting:

Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim Tukul Rameyo Adi
Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso
Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan Lambock V. Nahattands
Staf Khusus Menteri Koordinator Atmadji Sumarkidjo
Staf Khusus Menteri Koordinator Septian Hario Seto
Kepala Biro Perencanaan Suparman
Kepala Biro Informasi dan Hukum Latief Nurbana
Kepala Biro Umum Djoko Hartoyo

Penyusun:

Kepala Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi, Biro
Perencanaan Iwa Gemino
Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja,
Biro Perencanaan Bambang Herunadi
Kepala Bagian Program dan Anggaran,
Biro Perencanaan Dirhansyah Conbul
Kepala Bagian Administrasi Kerjasama,
Biro Perencanaan Caecilia Rini Parwati
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,
Biro Informasi dan Hukum Anjang Bangun Prasetyo
Kepala Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis,
Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi,
Biro Perencanaan Yetri Fermila
Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja, Bagian
Akuntabilitas Kinerja, Biro Perencanaan Tahyanto Abdillah
Kepala Subbagian Penyusunan Program, Bagian
Program dan Anggaran, Biro Perencanaan Samuel Rahallus
Tenaga Humas Pemerintah Nostal Nuans Saputri
Pelaksana Dukungan Kebijakan Strategis Sapari
Dian Ayuningtyas
Pelaksana Dukungan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Mohamad Fajar Rahman
Andini Mey Larasati

Penerbit: Biro Perencanaan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Tahun Terbit: 2018
Halaman: ii, 135 halaman
Kategori: Capaian Kinerja (Non fiksi)
Ukuran: 30 cm x 23 cm
ISBN: 978-623-90276-0-5

Kontributor:

Tenaga Ahli Menteri Bidang Kelautan
Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Kreatif dan Pengembangan Sumber
 Daya Manusia
Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro
 Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi
 Sekretaris Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
 Sekretaris Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa
 Sekretaris Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur
 Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
 Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim, Deputy Bidang Koordinasi
 Kedaulatan Maritim
 Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim, Deputy Bidang Koordinasi
 Kedaulatan Maritim
 Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim, Deputy Bidang Koordinasi
 Kedaulatan Maritim
 Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim, Deputy Bidang Koordinasi
 Kedaulatan Maritim
 Asisten Deputy Sumberdaya Hayati, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya
 Alam dan Jasa
 Asisten Deputy Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputy Bidang
 Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
 Asisten Deputy Sumber daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional, Deputy
 Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa
 Asisten Deputy Jasa Kemaritiman, Deputy Bidang Koordinasi Sumber daya
 Alam dan Jasa
 Asisten Deputy Infrastruktur Pertambangan dan Energi, Deputy Bidang
 Koordinasi Infrastruktur
 Asisten Deputy Industri Penunjang Infrastruktur, Deputy Bidang Koordinasi
 Infrastruktur
 Asisten Deputy Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata, Deputy
 Bidang Koordinasi Infrastruktur
 Asisten Deputy Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik, Deputy Bidang
 Koordinasi Infrastruktur
 Asisten Deputy Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim,
 Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
 Asisten Deputy Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputy Bidang Koordinasi
 SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
 Asisten Deputy Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Deputy Bidang Koordinasi
 SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
 Asisten Deputy Jejaring Inovasi Maritim, Deputy Bidang Koordinasi SDM,
 IPTEK, dan Budaya Maritim
 Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



Atraksi lompat baru pada Pesta Ya'ahowu P. Nias
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)

DAFTAR ISI

ii TIM PENYUSUN

1 KONTRIBUTOR

3 DAFTAR ISI

16 PROFIL

KEMENKO

BIDANG

KEMARITIMAN

22 PROFIL PEIABAT

24 PROFIL SINGKAT
MENKO MARITIM

132 PENUTUP

4 SAMBUTAN

6 KATA PENGANTAR

8 PROLOG

26 MENGAWAL POROS MARITIM DUNIA

34 KINERJA MAKRO
BIDANG KEMARITIMAN

36 PEMBANGUNAN
PARIWISATA

38 KETAHANAN ENERGI

40 PENGUATAN
KONEKTIVITAS

45 PERTUMBUHAN PDB
PERIKANAN

10 IKHTISAR KINERJA

12 KILAS CAPAIAN PROGRAM
PRIORITAS

14 PERISTIWA PENTING

50 CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS

52 PENGELOLAAN GEOPARK
INDONESIA

62 KURIKULUM MUATAN
KEMARITIMAN

68 EKSPEDISI NUSANTARA JAYA

76 PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAS CITARUM

84 *ARCHIPELAGIC AND ISLAND
STATES FORUM*

92 RUJUKAN NASIONAL DATA
KEWILAYAHAN

97 TOL LAUT

105 BANDARA INTERNASIONAL
JAWA BARAT

108 DESTINASI PARIWISATA
PRIORITAS

116 PENANGANAN SAMPAH LAUT

122 *LIGHT RAIL TRANSIT*

126 SAIL INDONESIA



Sambutan

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman





Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama sebagai pribadi maupun selaku Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia saya ingin mengucapkan rasa gembira saya atas terbitnya buku dengan judul *Potret Keberhasilan Program Prioritas Kemenko Bidang Kemaritiman Periode 2015-2018* yang disusun oleh tim Biro Perencanaan Kemenko Maritim.

Buku di hadapan Anda ini, merupakan sebetulnya risalah tentang realisasi program prioritas di bidang kemaritiman. Di dalamnya terkandung informasi lengkap mengenai capaian kuantitatif hingga akhir 2018, yaitu empat tahun setelah Kemenko ini berdiri tahun 2014 lalu.

Program Prioritas berupa realisasi tol laut, modernisasi pelabuhan, penanganan sampah laut, implementasi kurikulum muatan kemaritiman, dan peran aktif Indonesia di forum-forum kemaritiman dunia merupakan sebagian dari upaya mengejawantahkan pembangunan kemaritiman yang berbasiskan kepentingan nasional. Elok kita berbangga bahwa kini Indonesia oleh dunia dianggap sebagai *champion* atau pemuka yang sangat aktif mengangkat isu-isu penanganan sampah laut.

Buku ini secara jelas menggambarkan kiprah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama seluruh pemangku kepentingan terus meneguhkan komitmen pembangunan nasional yang berorientasi pada bidang kemaritiman. Komitmen tersebut tercermin jelas pada sejumlah program prioritas dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pengawal poros maritim dunia.

Secara umum dapat saya katakan, pencapaian program prioritas dan strategis sepanjang periode 2015-2018 sudah cukup menggembirakan. Sebagai contoh, pelaksanaan tol laut yang hingga saat ini telah beroperasi sebanyak 15 trayek berhasil menurunkan harga barang-barang sebesar 25% di wilayah Indonesia bagian timur. Berkurangnya disparitas harga ini secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di bagian timur Tanah Air, yang selama berpuluh tahun kurang diperhatikan kehidupannya.

Terhadap seluruh pencapaian program prioritas ini, saya mengapresiasi setiap peran dan kerja keras Kementerian/Lembaga, utamanya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Inilah wujud nyata dari kerja bersama untuk prestasi Bangsa dan Negara kita.

Semoga buku sederhana ini dapat memberi manfaat tidak hanya bagi seluruh pemangku kepentingan tetapi juga masyarakat luas yang merasakan dampak pembangunan.

Selamat membaca

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Desember 2018



Luhut B. Pandjaitan
Jenderal TNI (Purn)





Kata Pengantar

Agus Purwoto
Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan tujuan besar untuk masa depan bangsa, terutama dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di wilayah strategis dan memiliki sumber daya alam laut yang besar, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman/Kemenko Bidang Kemaritiman mempunyai fungsi untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kegiatan di bidang kemaritiman telah menetapkan visi: Indonesia Poros Maritim Dunia. Beberapa program prioritas telah dilaksanakan sebagai strategi dalam pencapaian visi tersebut.

Buku ini berisikan informasi capaian keberhasilan program strategis dan pada penerbitan edisi pertamanya buku *Success Story* ini fokus menyajikan informasi mengenai program prioritas yang telah berhasil dan memberikan manfaat (*outcome*) kepada publik. Akan diterbitkan lagi buku *Success Story* Kemenko Bidang Kemaritiman edisi kedua untuk melengkapi capaian program prioritas, keberhasilan seluruh program prioritas Kemenko Bidang Kemaritiman masa kabinet kerja 2015-2019 agar dapat dipublikasikan secara utuh.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja secara optimal dan juga pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berupa saran, masukan bahkan kritik sehingga buku ini dapat terbit. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

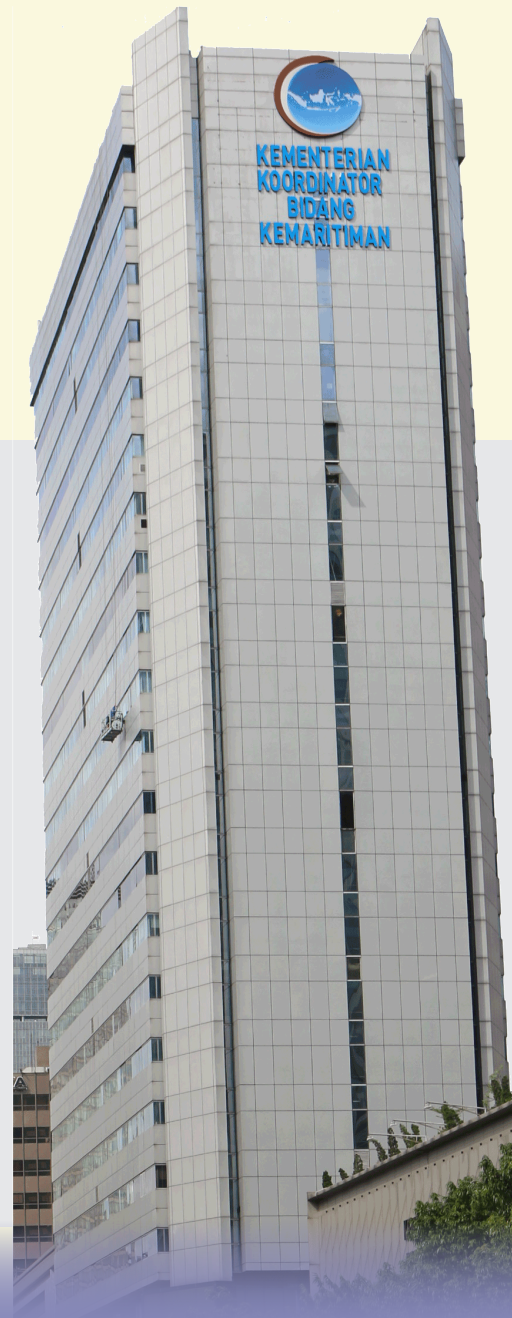
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Desember 2018
Sekretaris Kementerian Koordinator,



Agus Purwoto

Prolog



Pendahuluan

Di tengah semakin ketatnya persaingan global saat ini, pembangunan di bidang kemaritiman tidak lagi relevan ditempatkan sebagai wacana semata, melainkan telah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Apalagi, pemerintah telah menetapkan bidang kemaritiman sebagai spirit pembangunan nasional, lengkap dengan segala dinamika dan tantangannya.

Itu sebabnya, implementasi program pembangunan kemaritiman telah, sedang dan akan terus diselenggarakan. Di antara begitu banyak program dan kegiatan tersebut, terdapat program prioritas yang menjadi fokus Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sebagai salah satu instrumen penyebarluasan informasi, buku ini disusun dengan semangat untuk memotret keberhasilan 12 program prioritas yang dilaksanakan sepanjang periode 2015-2018. Tentu saja, program-program tersebut sengaja dipilih antara lain karena memenuhi kriteria sebagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Realisasi infrastruktur konektivitas seperti pembangunan bandara, pelabuhan, kereta api ringan, tol laut merupakan beberapa contoh program prioritas yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Karena itu, kami mengucapkan terima kasih para Deputi, Staf Ahli, maupun Staf Khusus beserta jajaran atas kontribusinya dalam penyediaan data-data penting dan terbaru. Pada akhirnya, kami berharap, buku di hadapan Anda ini dapat menjadi salah satu jejak kesuksesan pembangunan kemaritiman di tanah air.



Kegiatan Raimuna Nasional X, Jayapura
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kematriman (TS)

Ikhtisar Kinerja



Kilas Capaian Program Prioritas

pesona indonesia 

Destinasi
Pariwisata
Prioritas

10 Kawasan
Strategis DPP



Light Rail Transit

48,6%

Progres Tahap 1
Jabodebek



Sail Indonesia

10 Pelaksanaan

Periode 2009-2018



Pengelolaan Geoparks

4 UNESCO

Global
Geopark



Bandara Internasional
Jawa Barat

5 Juta

Penumpang/Tahun



BIJB
Airport and Aerocity Investment Company

Percepatan Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
DAS Citarum



7 Tahun

Target Sungai Bersih

AIS Forum
Tahun 2017
Diinisiasi
Pemerintah RI



Ekspedisi
Nusantara Jaya
3.000 Peserta
ENJ 2017



Tol Laut
15 Trayek
Beroperasi



Rujukan Nasional Data Kewilayahan dan Pembaruan
Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

108.000 Km

Garis Pantai



Penanganan Sampah Laut

70%

Target
Reduksi



Kurikulum Kemaritiman

48
Sekolah
Percontohan





Peristiwa Penting



Sumber: Humas/Kemenko/Bidang/Kemaritiman

23 November 2017

- Konferensi AIS Sepakati Pembentukan Forum Negara Kepulauan Atasi Dampak Perubahan Iklim



Sumber: Humas/Kemenko/Bidang/Kemaritiman

13 September 2018

- Pemerintah Promosikan “Wonderful Geoparks of Indonesia” di Konferensi dan Pameran Global Geopark UNESCO Italia



Sumber: Humas/Kemenko/Bidang/Kemaritiman

29 Agustus 2018

- Menko Luhut Targetkan Pemasukan US\$ 28,5 Miliar dari Sektor Pariwisata



Sumber: Humas/Kemenko/Bidang/Kemaritiman

4 Mei 2017

- Menko Luhut: Tol Laut Menekan Disparitas Harga Hingga 25 Persen



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

10 Agustus 2018

Menko Maritim Luncurkan **Data Rujukan Wilayah Kelautan** Indonesia



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

17 Juli 2018

Kemenko Maritim Resmi Lepas **Tim Ekspedisi Nusantara Jaya 2018** Universitas Hasanuddin



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

24 Mei 2018

Dampingi Presiden Jokowi, Menko Luhut Lakukan Pendaratan Perdana di **Bandara Internasional Kertajati**



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

20 April 2018

Menko Luhut: Pemerintah Serius Mengambil Langkah Hukum Bagi yang Membuang **Sampah di Laut**



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

6 April 2018

Menko Luhut : Jika Masih Ada Yang Mencemari **Citarum**, Akan Ditindak Tegas Tanpa Kecuali!



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

8 Desember 2017

Menko Luhut: Struktur **Pembiayaan LRT** adalah Kombinasi APBN dan Pembiayaan Komersial



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

3 Agustus 2017

Menko Luhut Pimpin Rakor tentang Implementasi **Kurikulum Kemaritiman** dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

9 September 2018

Presiden Jokowi Sebut **Sail Moyo** Sebagai Awal Kebangkitan Wisata NTB, Menko Luhut: Salah Satu Solusi Atasi Current Account Deficit

Profil Kemenko Bidang Kemaritiman





**KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG
KEMARITIMAN**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**



Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, 10340
Telepon : +62 21-23951100
Fax : +62 21-3141790
Email : biroinfokum@maritim.go.id
Website : maritim.go.id



Tanggal Pendirian
27 Oktober 2014

Media Sosial



Kemenko Bidang Kemaritiman



@ kemaritiman



@ kemenkomaritim



Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman RI

Milestone



1

Dwisuryo Indroyono Soesilo

27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015



2

Rizal Ramli

12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016



3

Luhut Binsar Pandjaitan

27 Juli 2016 - Sekarang

Dasar Hukum Pendirian



Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 17
1945



UU Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian
Negara



Kepres Nomor 121/P Tahun
2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja
Periode 2014-2019



Kepres Nomor 165 Tahun
2014 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kabinet kerja



Perpres No. 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian
Negara



Perpres Nomor 10 Tahun
2015 tentang Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman

Kementerian/Lembaga yang Dikoordinasikan



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



Kementerian
Perhubungan



Kementerian
Pariwisata



Kementerian Kelautan
dan Perikanan



Instansi lain yang
dianggap perlu



Kunjungan Kerja Menko Bidang Kemaritiman

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kedudukan

- Bertanggung jawab kepada Presiden
- Dipimpin oleh Menteri Koordinator

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman

Fungsi

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian atau Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kemaritiman
- 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kemaritiman
- 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- 4. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penguatan negara maritim, dan pengelolaan sumber daya maritim
- 5. Koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana Kemaritiman
- 6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- 7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
- 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden



Ajang Pemilihan Puteri-Putera Maritim
Sumber: Deputi IV Kementerian Bidang Kemaritiman



Kegiatan Presiden bersama Menko Bidang Kemaritiman
Sumber: Humas Kemenlo Bidang Kemaritiman

Visi

Indonesia Poros Maritim Dunia

Misi

- Mempertegas jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan kuat
- Membangun kekuatan ekonomi maritim dengan dukungan IPTEK yang handal

Tujuan

- Mewujudkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat serta berdaulat dan bangsa bahari yang berkarakter budaya nusantara yang memiliki kepemimpinan kuat dalam diplomasi kemaritiman dunia
- Mengembangkan kekuatan ekonomi maritim yang berdaya saing melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas serta pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan dengan dukungan IPTEK yang handal

Sasaran

- 01 Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif berkarakter dan berbudaya nusantara
- 02 Terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang berperan aktif di tingkat regional dan global
- 03 Meningkatnya nilai tambah sumber daya alam dan jasa maritim secara berkelanjutan
- 04 Terwujudnya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim



Profil Pejabat

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman



Agus Purwoto
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim



Ir. Agung Kuswandono, M.A.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa





Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur



Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA
Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim



DR. Ir. Tukul Rameyo, M.T
Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim



DR. Ir. Sugeng Santoso, M.T
Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim



Profil Singkat Menko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947; umur 72 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015 beliau ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 – 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 – 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, beliau menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.





Kegiatan Presiden bersama Menko Bidang Kemaritiman
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kunjungan Kerja Menko Bidang Kemaritiman
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Mengawal Poros Maritim Dunia





Pemahaman Poros Maritim

Poros dapat dipahami sebagai sumbu, acuan atau rujukan. Dalam konteks tersebut, poros maritim dunia dapat dimaknai sebagai rujukan peradaban maritim dunia. Kata rujukan di sini juga bisa dimaknai sebagai pusat orientasi atau kiblat. Dengan demikian, Indonesia poros maritim dunia harus dimaknai sebagai Indonesia yang menjadi pusat orientasi peradaban maritim dunia.

Menjadi poros maritim dunia pada hakikatnya adalah menjadi sebuah negara kepulauan yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban kemaritiman dunia. Hal ini sesuai dengan visi Kabinet Kerja yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.



“ Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia

Presiden Joko Widodo

dalam pidato pada KTT Asia Timur,
di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014

“

Indonesia memiliki visi dan misi menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional

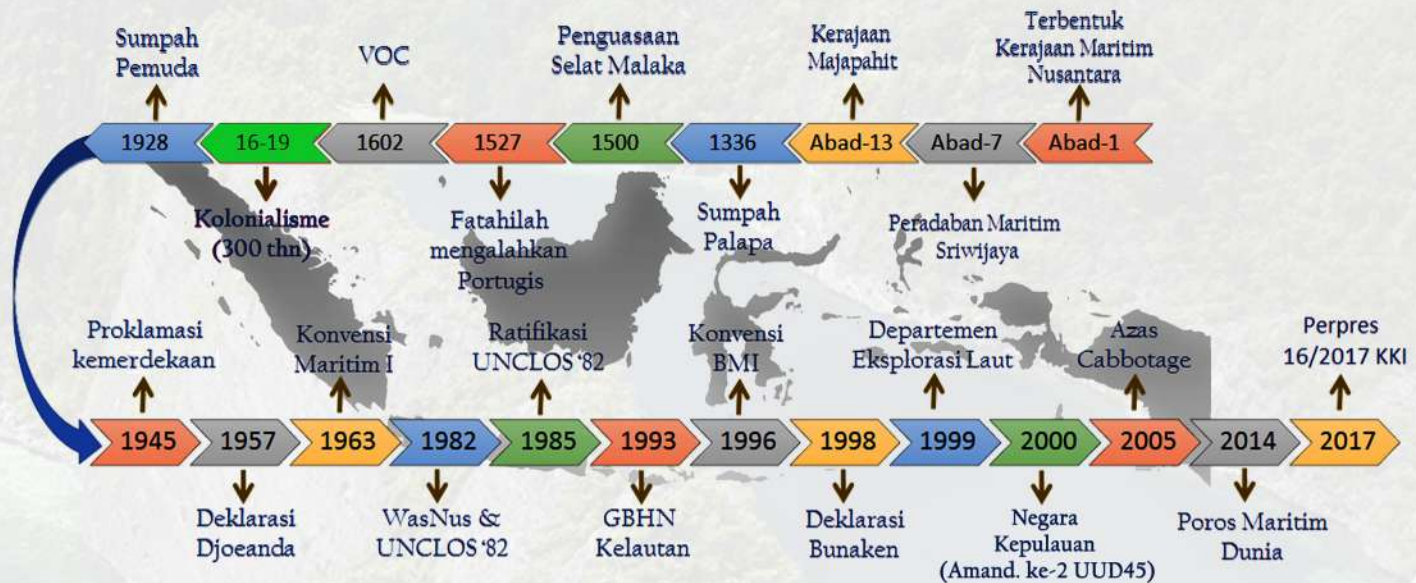
Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan

dalam pidato pada kuliah umum
di Universitas Airlangga,
Surabaya, 8 September 2018



Jejak Kemaritiman Indonesia

Jati diri Bangsa Indonesia adalah Bangsa Bahari. Namun, selama berabad-abad kita kehilangan jati diri sebagai Bangsa Bahari akibat kolonialisme. Keperkasaan dan kejayaan nenek moyang di laut haruslah kembali menjadi penyemangat generasi sekarang dan yang akan datang. Bentuk implementasinya masa kini adalah bagaimana bangsa Indonesia dengan wilayah yang 2/3 merupakan lautan dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan pembangunan bangsa.



7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia

1a. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	3. Tata Kelola dan Kelembagaan	5a. Pengelolaan Ruang Laut
1b. Pengembangan Sumber Daya Manusia	4a. Ekonomi Kelautan	5b. Perlindungan Lingkungan Laut
2a. Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Laut	4b. Infrastruktur Kelautan	6. Budaya Bahari
2b. Keselamatan di Laut	4c. Peningkatan Kesejahteraan	7. Diplomasi Maritim



Rencana Strategis Bidang Kemaritiman 2015-2019

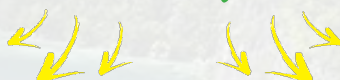
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mencanangkan bahwa Indonesia harus mampu meraih kembali kejayaan maritim. Gagasan menjadi poros maritim dunia adalah sangat tepat dikemukakan saat ini mengingat kondisi perekonomian Asia Pasifik sedang dalam perkembangan pesat.



Regulasi dan Kebijakan Bidang Kemaritiman

Sepanjang 2015-2018, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah menetapkan sejumlah regulasi dan kebijakan yang meneguhkan posisi sebagai poros maritim dunia. Regulasi dan kebijakan tersebut tertuang dalam sejumlah aturan, antara lain dalam bentuk Inpres, Perpres, dan Permenko Kemaritiman.

40 Kebijakan



Ketahanan Energi

- **Perpres No.125/2015** terkait Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga BBM
- **Perpres No.126/2015** terkait Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil
- **Perpres No.40/2016** tentang Penetapan Harga Gas Bumi
- **Perpres No.18/2016** terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa)
- **Permen ESDM No 16 Tahun 2016**

Kedaulatan Pangan dan Lingkungan

- **Inpres No.7/2016** terkait Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
- **Perpres No.3/2017** tentang RAN Percepatan pembangunan industri perikanan nasional
- **Perpres No.15/2018** tentang Percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum
- **Permenko No.8/2018** tentang Tata Kerja Pengarah dan Tim Satgas terkait PPK DAS Citarum
- **Perpres No.42/2016** terkait Pembentukan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC)
- **Perpres No.83/2018** tentang penanganan sampah laut

Pariwisata

- **Perpres No.69/2015** tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 45 Negara
- **Perpres No.104/2015** tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 90 Negara
- **Perpres No.21/2016** tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 Negara
- **Perpres No.115/2015** terkait Perizinan Kapal Wisata
- **Perpres No.49/2016** tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba
- **PP No.6/2016** tentang KEK Tanjung Kelayang
- **PP No.5/2017** tentang KEK Arun Lhokseumawe
- **PP No.31/2016** tentang KEK Sorong
- **Perpres No.46/2017** tentang Badan Otorita Pengelola Pariwisata Kawasan Borobudur
- **Perpres No.32/2018** tentang Badan Otorita Pengelola Pariwisata Kawasan Labuan Bajo Flores
- **Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata melalui Geopark (Pengembangan Taman Bumi)**

Kedaulatan dan Budaya Maritim

- **Perpres No.115/2015** terkait Pemberantasan Ikan Secara Illegal
- **Perpres No.16/2017** tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
- **Peta NKRI Tahun 2017**
- **Buku Putih Diplomasi Maritim**
- **Pembangunan Karakter Bahari Pemuda melalui Ekspedisi Nusantara Jaya** (Diikuti 8000 pemuda, lebih dari 200 Pulau yang disinggahi)
- **Implementasi Kurikulum Kemaritiman di 48 Sekolah pada 12 Provinsi**
- **Peran Aktif Indonesia di forum Internasional**

Infrastruktur dan Konektivitas

- **Permenko No.22/2015** tentang Satgas *Dwelling Time*
- **Perpres No.47/2016** tentang Penetapan Pelabuhan Patimban
- **Perpres No.6/2017** terkait Penyelenggaraan Perkeretaapian
- **Perpres No.49/2017** terkait Percepatan LRT Jabodetabek
- **Perpres No.70/2017** terkait Pelayanan Publik Angkutan Barang
- **PP No.31/2016** tentang KEK Sorong
- **PP No.5/2017** tentang KEK Arun Lhokseumawe
- **Permenko No.7/2016** tentang Zonasi KEK Sorong
- **PP No.29/2018** tentang Pemberdayaan Industri
- **PP No.6/2016** tentang KEK Tanjung Kelayang
- **Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018** tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Wisata Karang Pantai Siung, Geopark Gunung Sewu
Sumber: Endang Tonari

Pura Segara, Geopark Gunung Batur
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Peran Indonesia dalam Forum Kemaritiman Dunia

Indonesia memiliki peran strategis dalam forum kemaritiman dunia. Sejalan dengan beragam kegiatan internasional yang diikuti, kontribusi Indonesia semakin diperhitungkan secara global.

- 01 Pemerintah membentuk forum negara kepulauan bekerjasama dengan *United Nations Development Program* (UNDP)
- 02 Penandatanganan *Exchanges of Notes on the Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market*
- 03 Perjanjian bertajuk *Plan of Action on Maritime Cooperation* telah ditandatangani oleh Indonesia-Australia
- 04 Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina secara resmi memulai kegiatan kerja sama patroli maritim terkoordinasi trilateral atau disebut *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*
- 05 Indonesia kembali mendapat kehormatan untuk menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization*) atau IMO Kategori C untuk periode 2018-2019
- 06 Proyek percontohan SPS *e-certification* ikan dan produk perikanan, dan pertukaran langsung sertifikat elektronik *Sanitary and Phyto-Sanitary* (SPS)
- 07 Indonesia resmi menjadi ketua IORA periode 2015 – 2017
- 08 Indonesia menjadi tuan rumah Forum/Konferensi Tingkat Menteri dari Negara Kepulauan dan Negara Pulau/*Archipelagic and Island States Forum* (AIS) pada tanggal 4-8 Oktober 2018
- 09 Konferensi Tingkat Tinggi Kelautan Dunia, Indonesia (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) terpilih sebagai Wakil Presiden Konferensi Kelautan Dunia pada tahun 2017
- 10 Indonesia memimpin pertemuan 7th ASEAN Maritime Forum (7th AMF)
- 11 Di tandatanganinya 2 Nota Kesepahaman dan 5 Kontrak Kerjasama antara Perusahaan kedua negara (Indonesia dan China)
- 12 Amerika Serikat mendukung Indonesia untuk menjadi tuan rumah *East Asia Summit Marine Litter Conference*

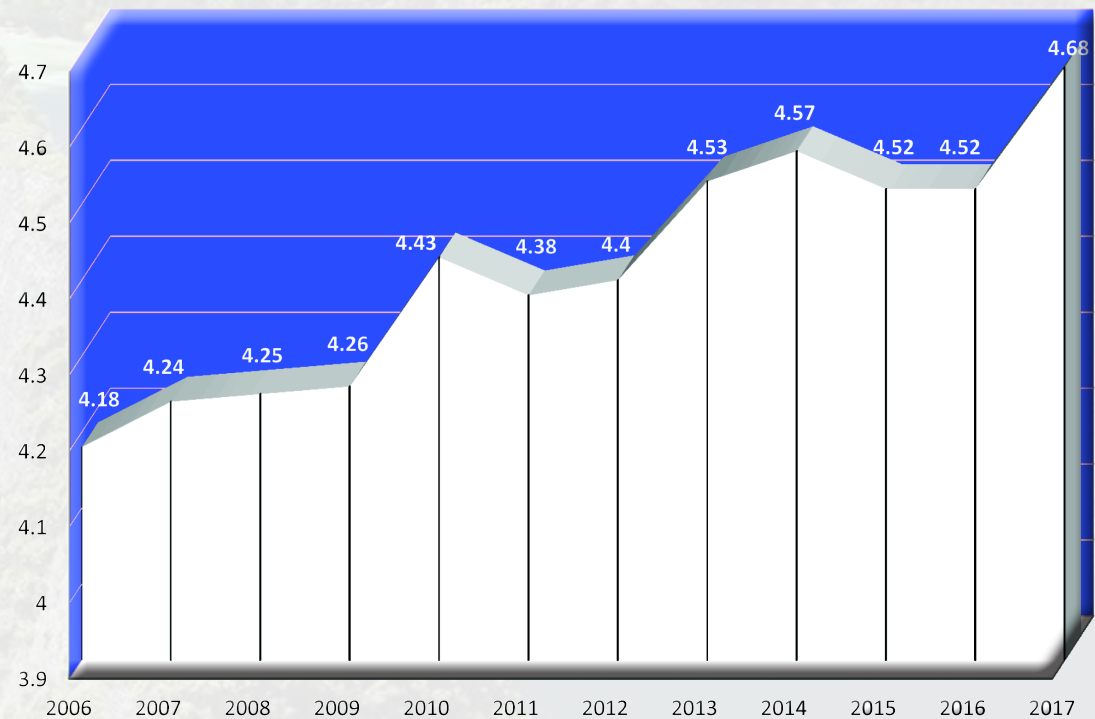


Rapat Kemenko Bidang Kemaritiman Bersama Presiden
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)

Kinerja Makro Bidang Kemaritiman

Dalam empat tahun terakhir (2014-2018), sejumlah indikator menunjukkan tren positif kinerja pemerintah di bidang kemaritiman. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan indeks daya saing, indeks performa logistik, hingga indikator makro bidang pariwisata, ketahanan energi, konektivitas, dan pengelolaan sumber daya kelautan.

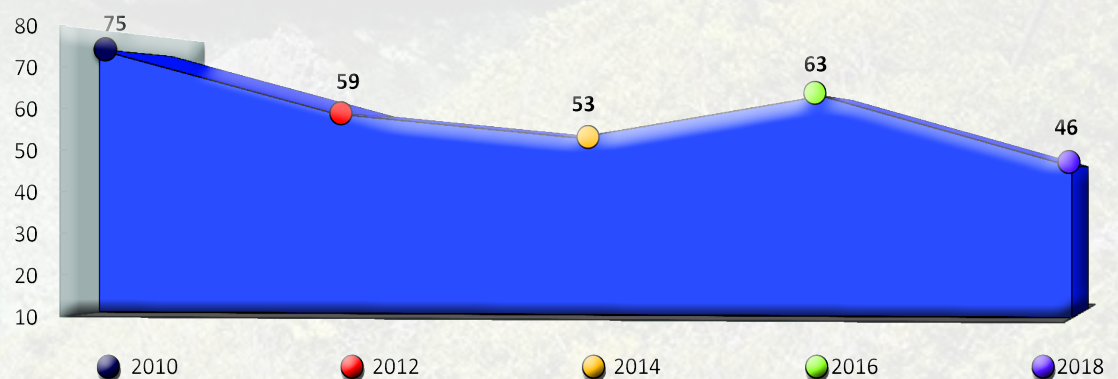
Indeks Daya Saing Global



Sumber: World Bank

GCI: Overall Index: EMDA: Indonesia

Indeks Performa Logistik



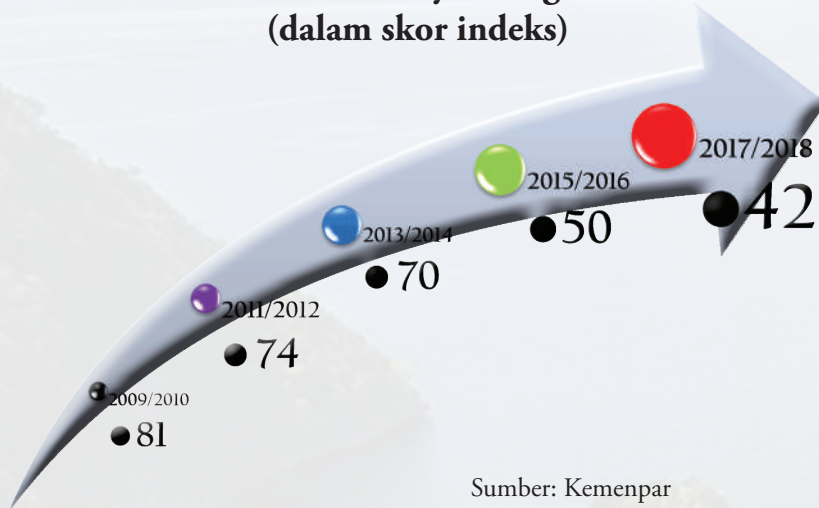
Sumber: World Bank

■ Indeks Performa Logistik



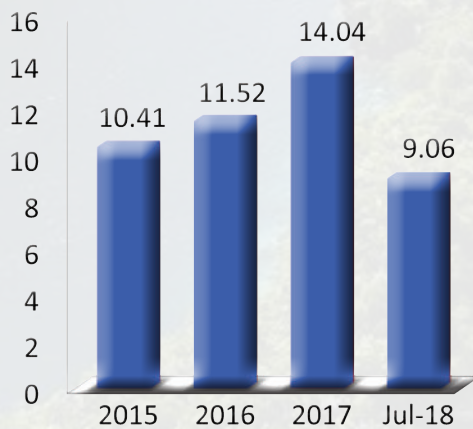
Pembangunan Pariwisata

**Indeks Daya Saing
(dalam skor indeks)**



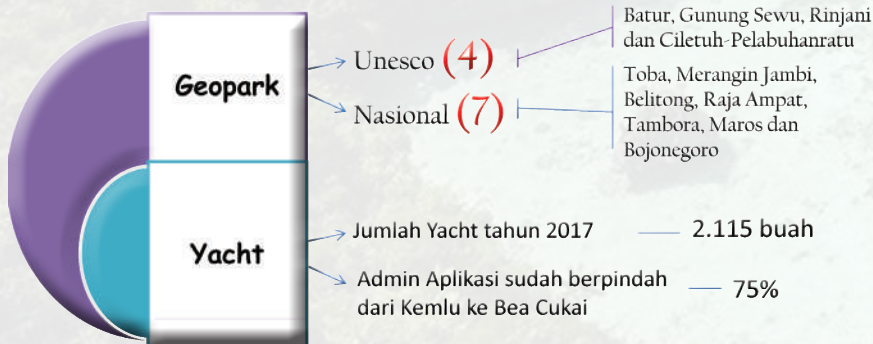
Sumber: Kemenpar

**Jumlah Wisatawan
(dalam juta orang)**



Sumber: Kemenpar

Pengembangan Destinasi Wisata



Sumber: Kemenpar

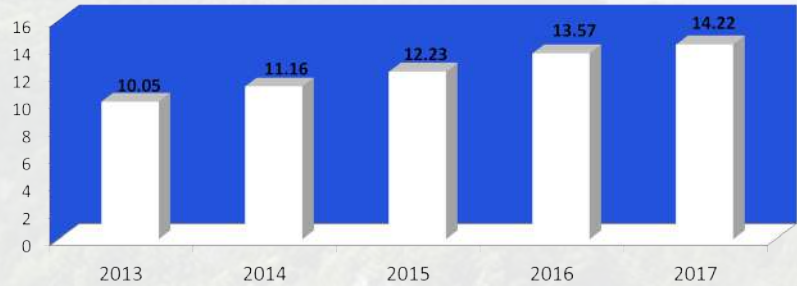


Kunjungan Kerja Menko Bidang Kemaritiman

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

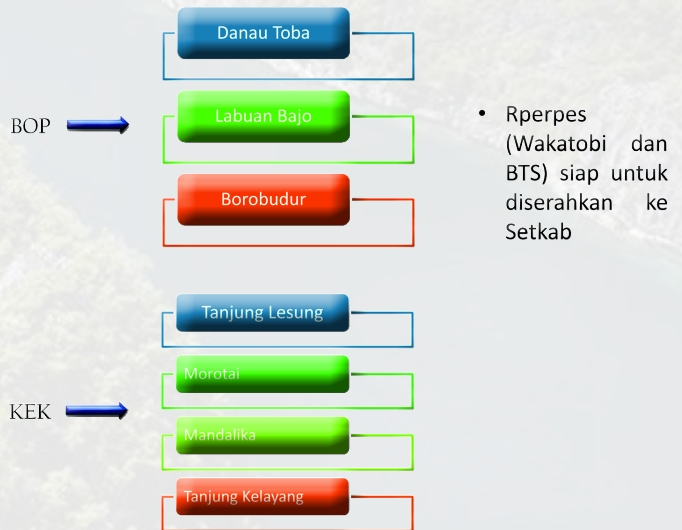


Devisa Komoditas Pariwisata (dalam juta US\$)



Sumber: Kemenpar

Pengembangan 10 KSPN Wisata (BOP & KEK)



- Rperpes (Wakatobi dan BTS) siap untuk diserahkan ke Setkab

* Kepulauan Seribu belum ada status

Sumber: Kemenpar

Penghargaan



13 Kali Bali Raih The Best Island in Asia Pacific (2018)



Nihiwatu Resort, Sumba Terpilih Sebagai

Hotel Terbaik Dunia (2016)

Sumber: Kemenpar



Ketahanan Energi

BBM Satu Harga



Total penyaluran BBM Satu Harga
hingga 2019: **156 lokasi**

Pertamina: **54 Lokasi** (2016 & 2017)
AKR: **3 Lokasi** (2017)

Sumber: BPH Migas

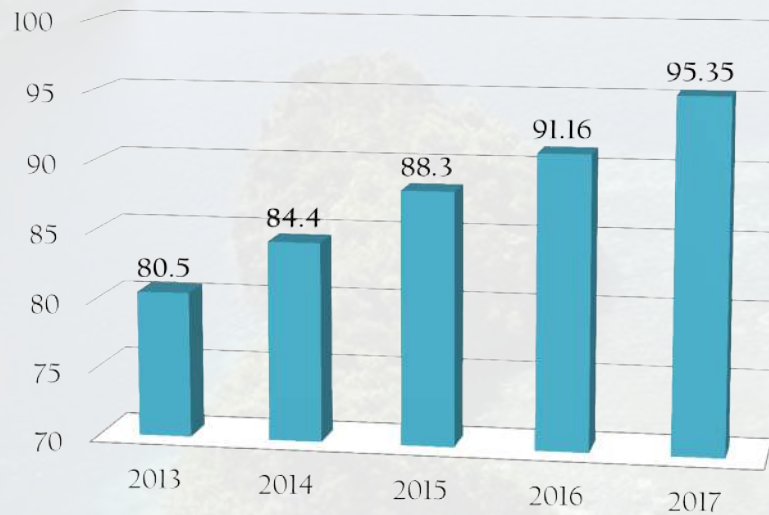
(jumlah lokasi penyaluran)



Sumber: Kementerian ESDM

Rasio Elektrifikasi

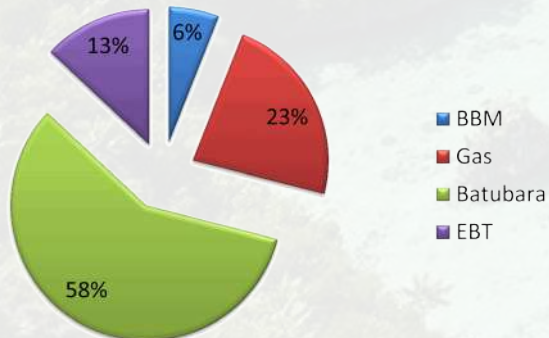
■ Dalam Persen



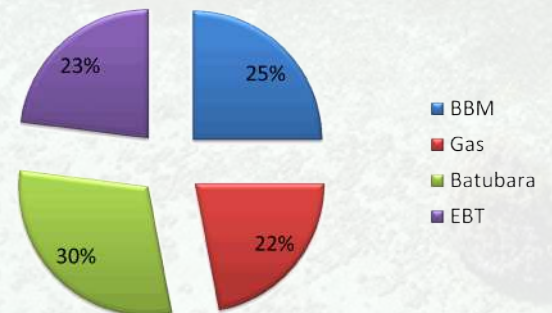
Sumber: Kementerian ESDM

Bauran Energi

REALISASI BAURAN ENERGI TH 2017

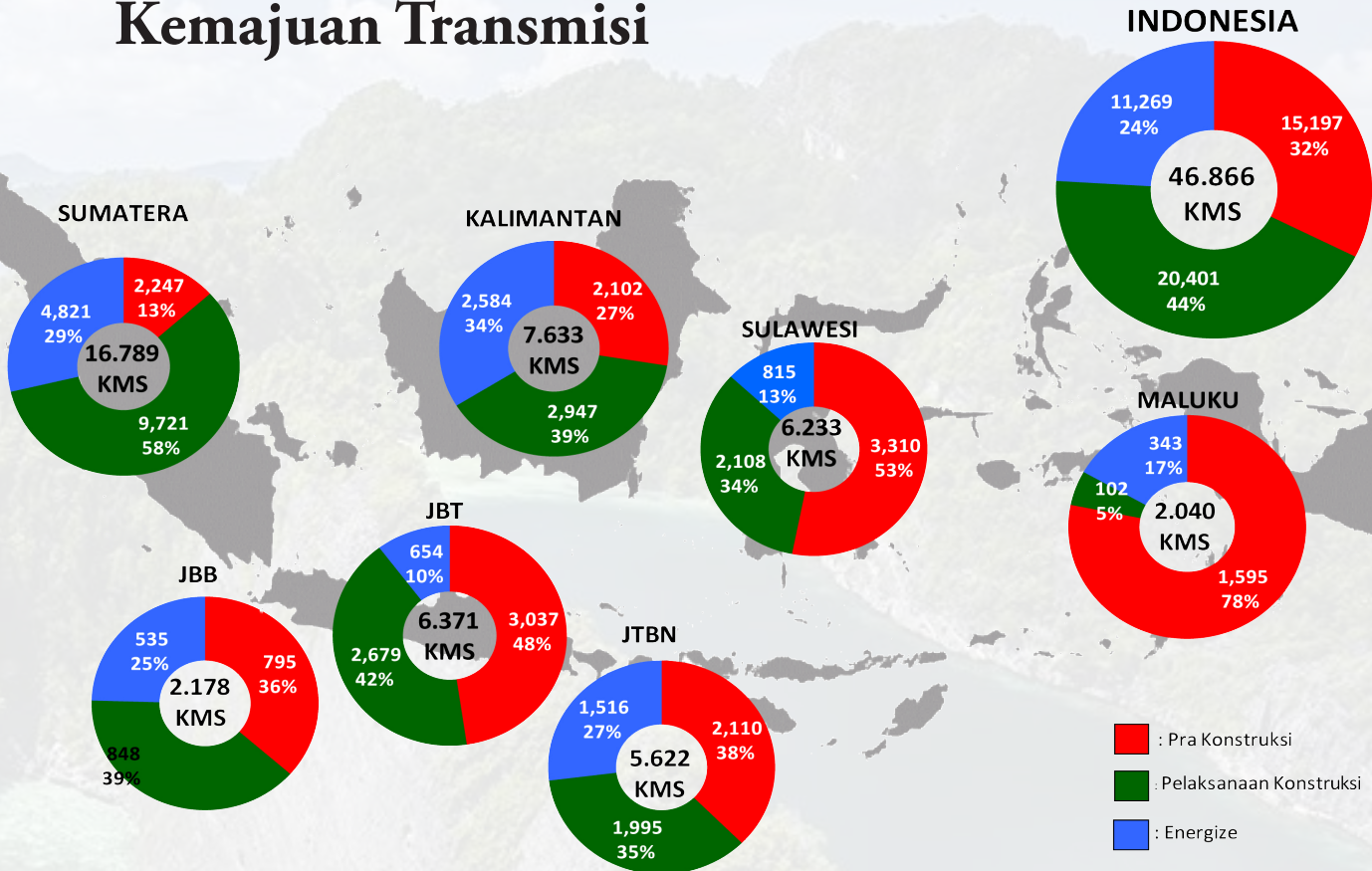


REALISASI BAURAN ENERGI TH 2025

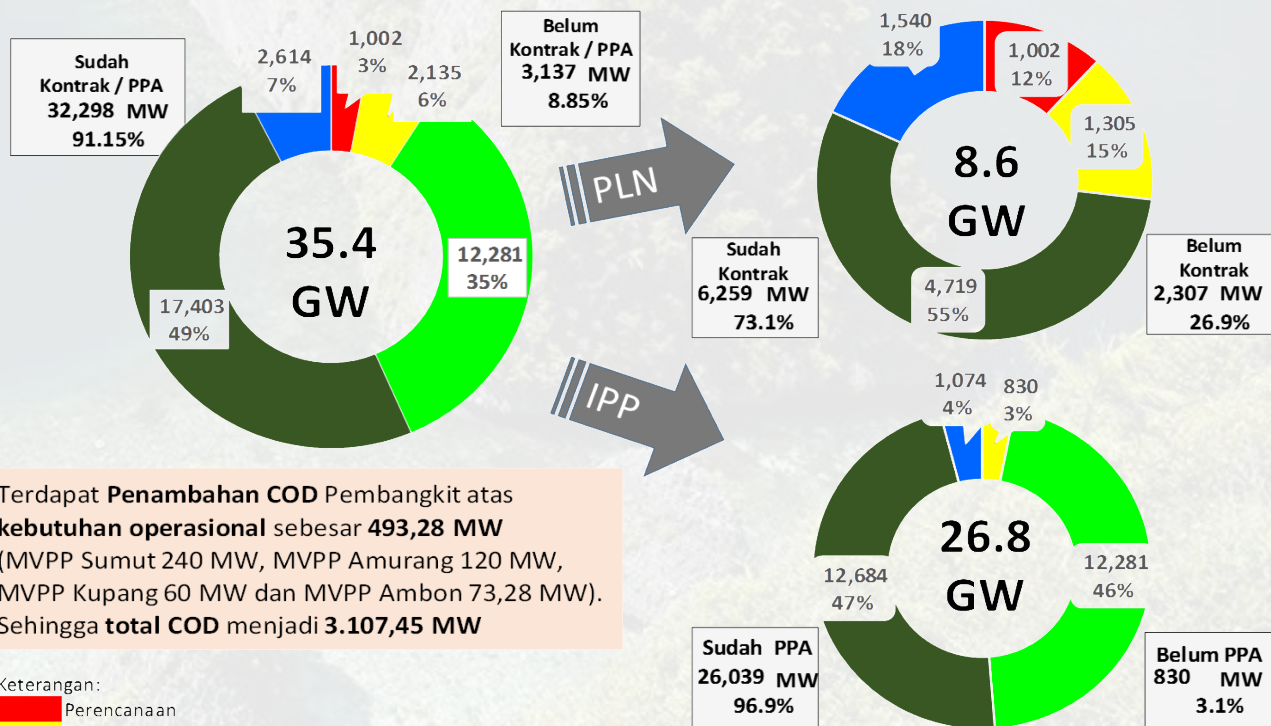


Sumber: Kementerian ESDM dan RUEN 2015-2050

Kemajuan Transmisi



Sumber: Kementerian ESDM



Terdapat **Penambahan COD** Pembangkit atas **kebutuhan operasional** sebesar **493,28 MW** (MVPP Sumut 240 MW, MVPP Amurang 120 MW, MVPP Kupang 60 MW dan MVPP Ambon 73,28 MW). Sehingga **total COD** menjadi **3.107,45 MW**

Keterangan:

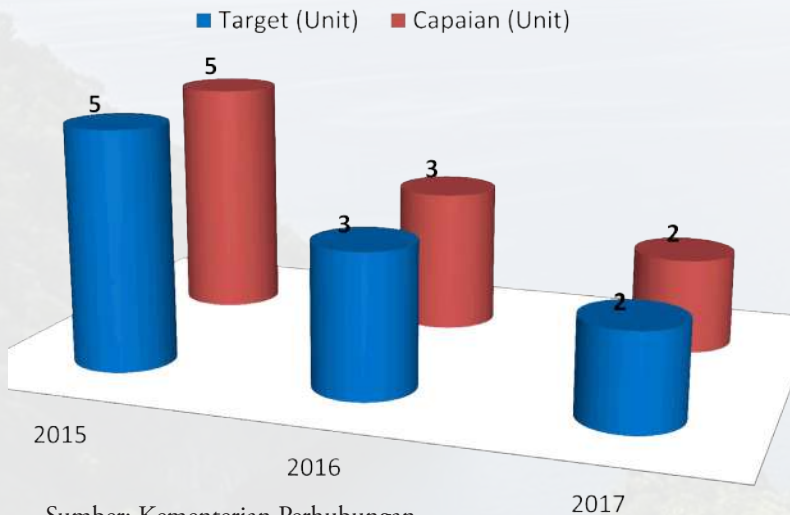
- Perencanaan
- Pengadaan
- Kontrak Belum Konstruksi
- Konstruksi
- COD/ SLO

Sumber: Kementerian ESDM



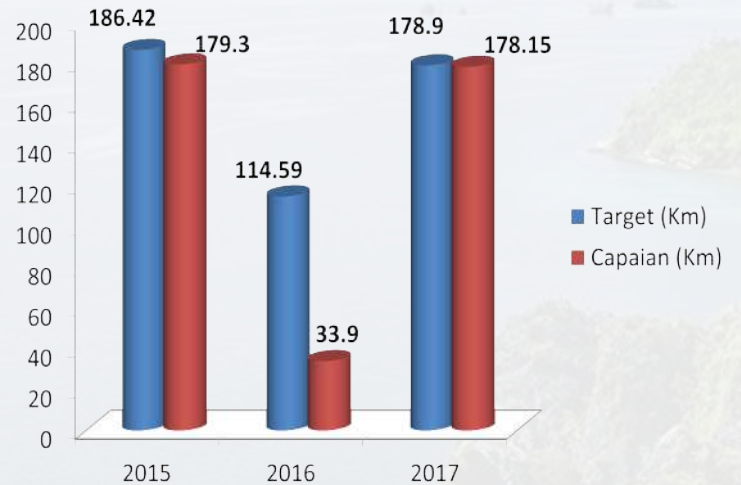
Penguatan Konektivitas

Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Kereta Api



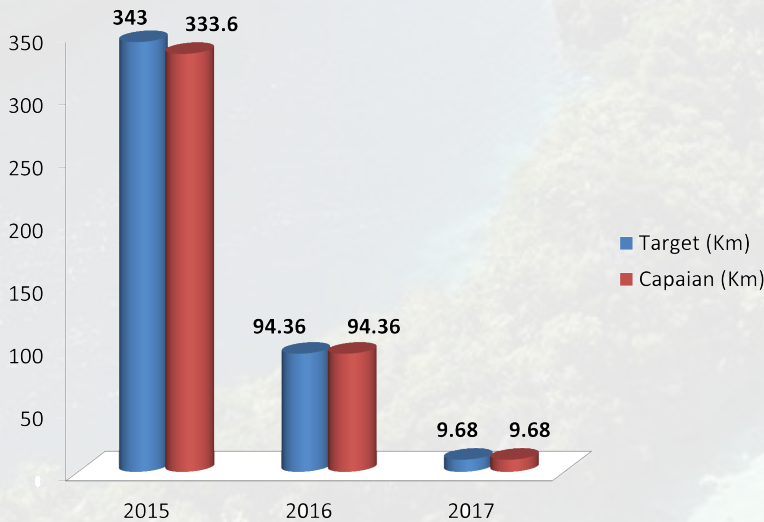
Sumber: Kementerian Perhubungan

Pembangunan Jalur KA



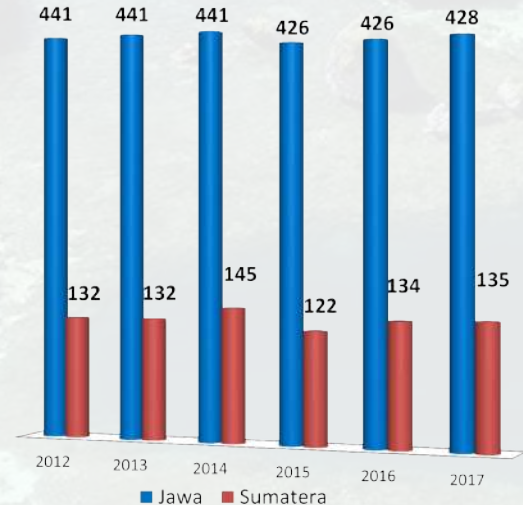
Sumber: Kementerian Perhubungan

Peningkatan dan Rehabilitasi Jalur KA



Sumber: Kementerian Perhubungan

Jumlah Stasiun Kereta Api di Jawa dan Sumatera



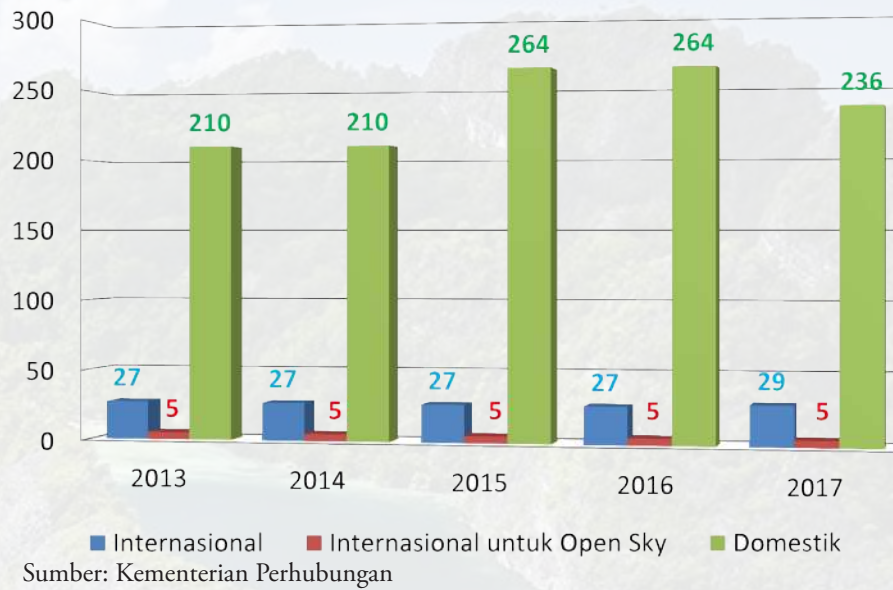
Sumber: Kementerian Perhubungan



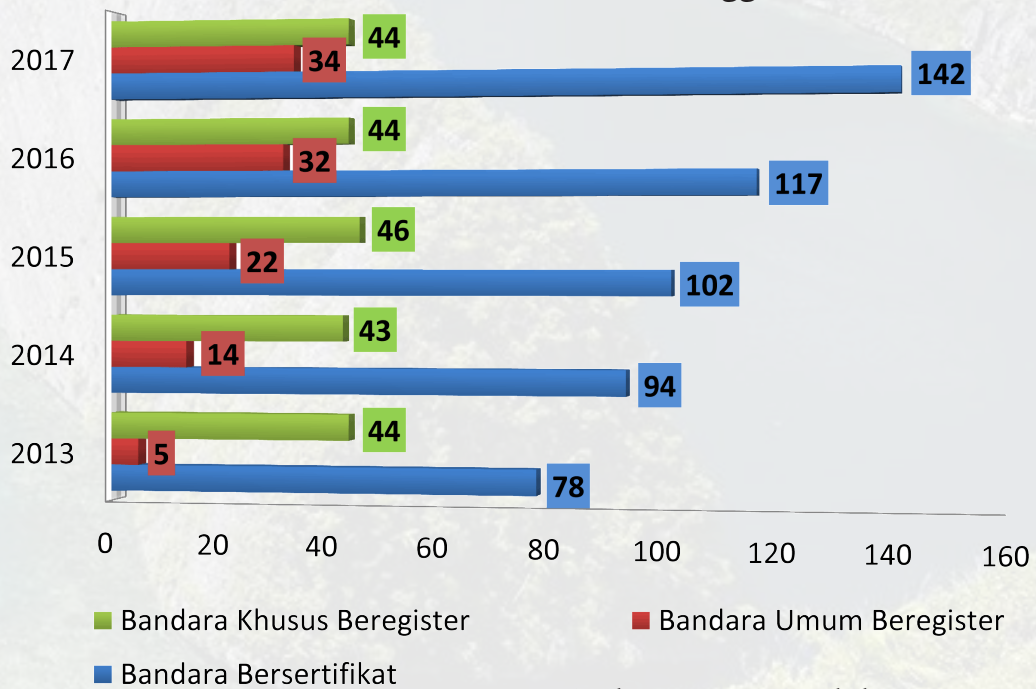
Peresmian Bandara Internasional Jawa Barat

Sumber: Humas Kemenko Bidang Koordinasi

Jumlah Bandar Udara Menurut Penggunaan (Unit)



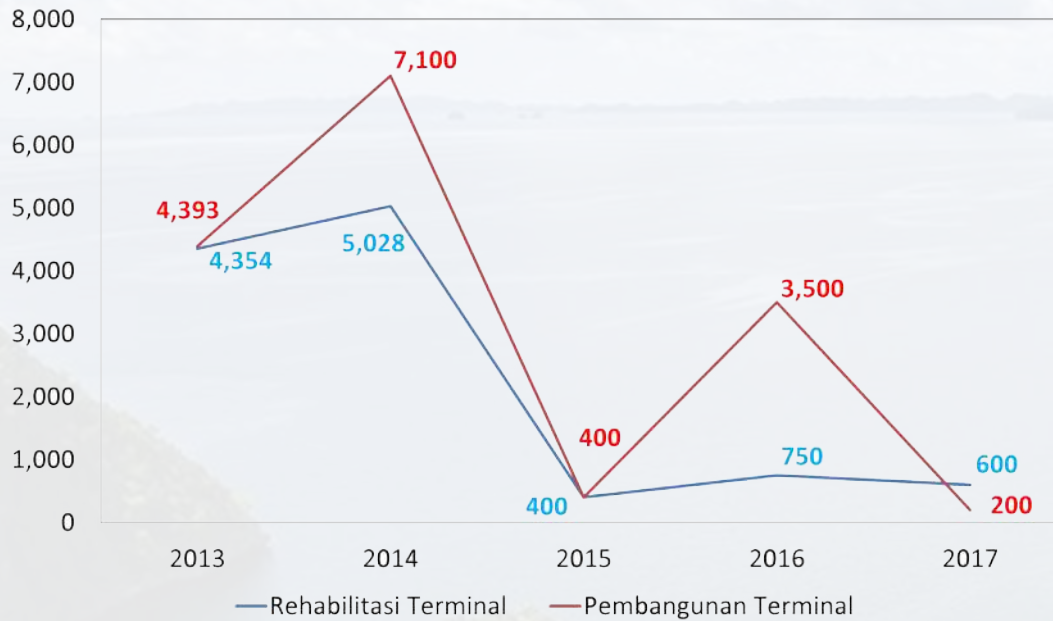
Jumlah Bandar Udara Menurut Penggunaan (Unit)



Bandara Internasional Jawa Barat
Sumber: BIJB

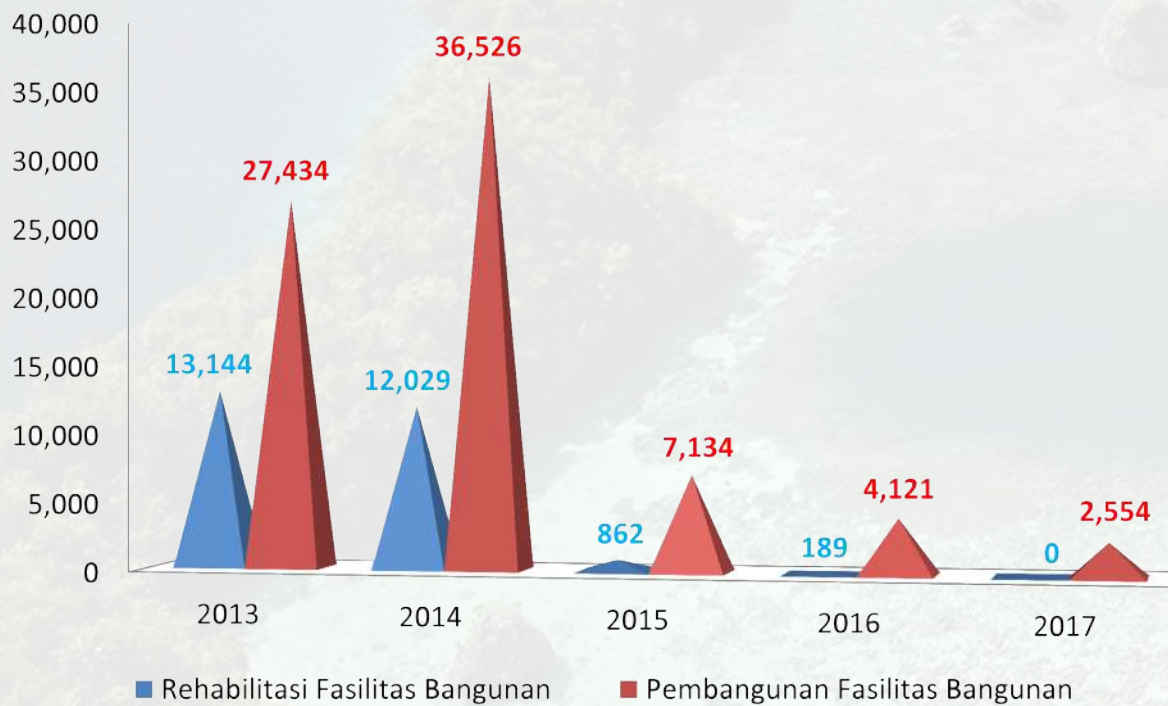


Realisasi Pembangunan Fasilitas Terminal Per Tahun (M2)



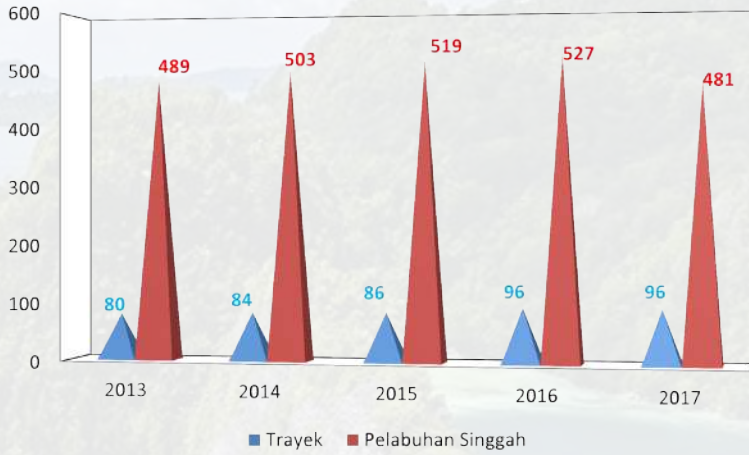
Sumber: Kementerian Perhubungan

Realisasi Pembangunan Fasilitas Bangunan Per Tahun (M2)



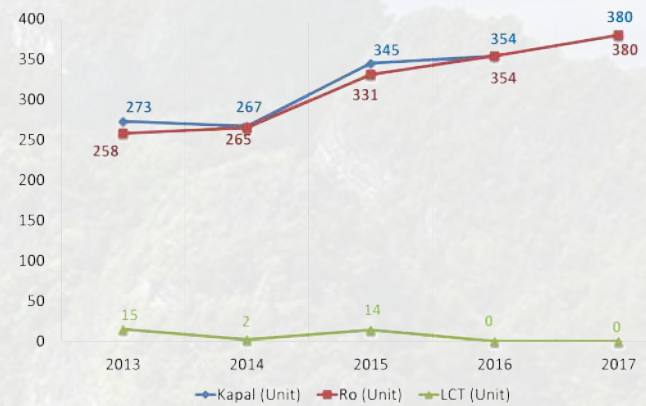
Sumber: Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis



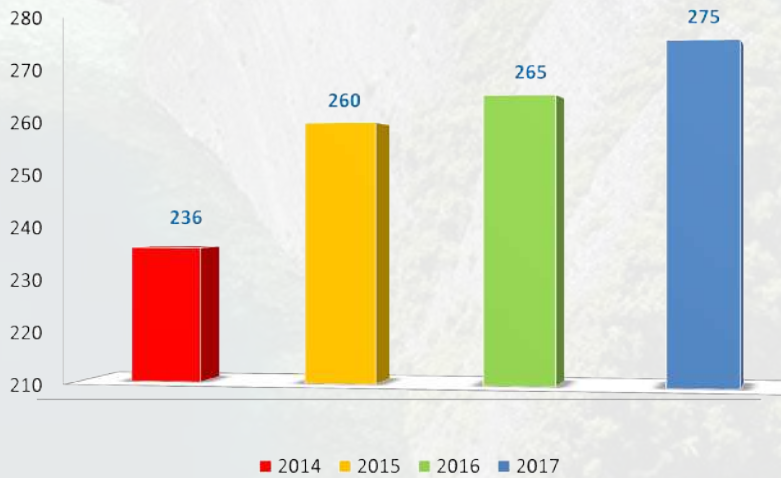
Sumber: Kementerian Perhubungan

Jumlah Armada Angkutan Penyeberangan



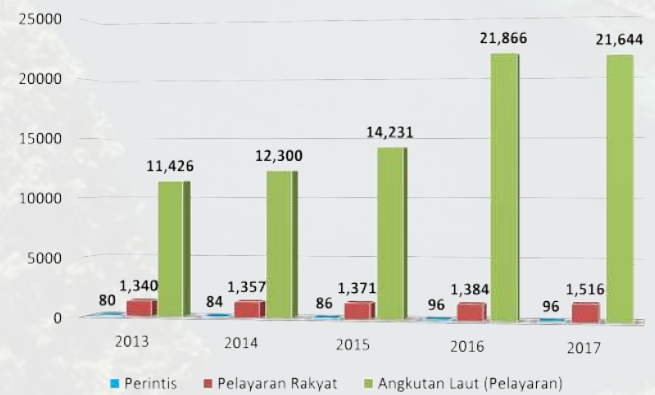
Sumber: Kementerian Perhubungan

Jumlah Dermaga Penyeberangan



Sumber: Kementerian Perhubungan

Jumlah Armada Angkutan Laut Berdasarkan Jenis Pelayaran



Sumber: Kementerian Perhubungan



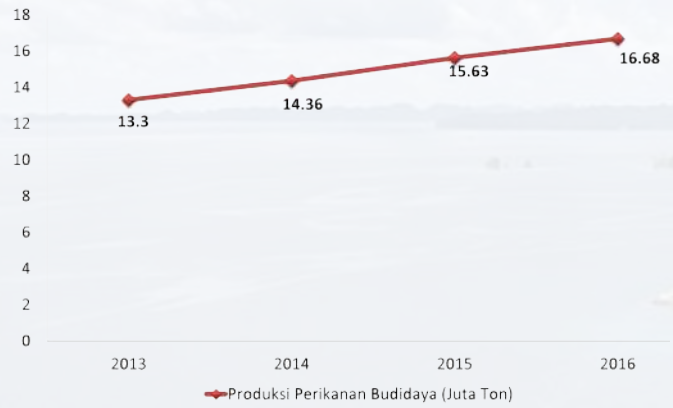


Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)



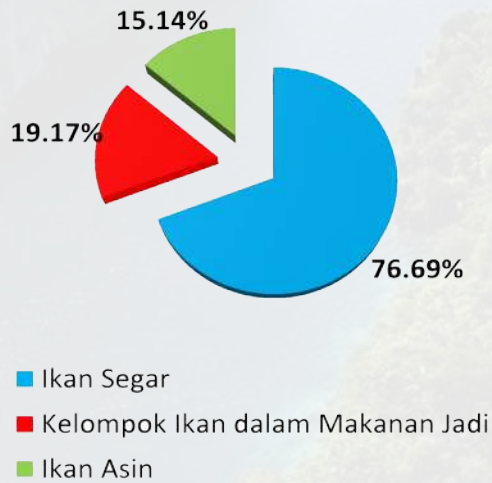
Sumber: BPS, KKP

Produksi Perikanan Budidaya (Juta Ton)



Sumber: BPS, KKP

Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

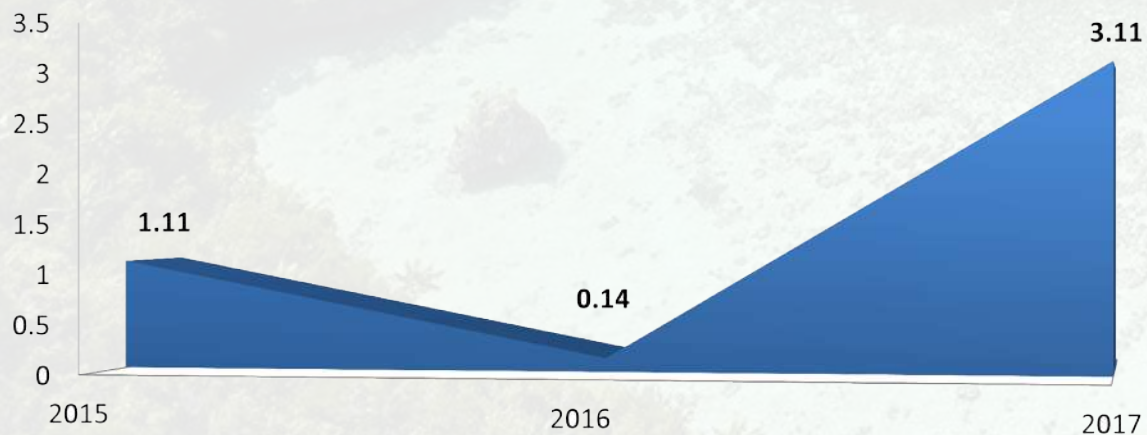


Sumber: BPS, KKP



Sumber: BPS, KKP

Produksi Garam Rakyat (Juta Ton)



Sumber: BPS, KKP



Aktivitas Petani Garam
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

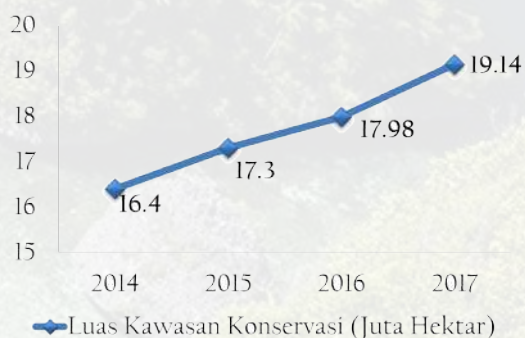
Pertumbuhan PDB Perikanan

Pertumbuhan PDB sektor perikanan selalu di atas PDB Nasional dan PDB sektor Pertanian. Hingga TW III 2017, pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 6,79% dengan nilai Rp169.513,10 miliar.

Uraian	2014	2015	2016	2017
Nilai PDB Perikanan (Miliar)	189,089.70	204,016.80	214,523.20	169,513.10
PDB Nasional (%)	5.02	4.88	5.02	5.03
PDB Pertanian (%)	4.24	3.00	3.16	5.15
PDB Perikanan (%)	7.35	7.89	5.15	6.79

Sumber: BPS, KKP

Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)



Kinerja Sektor Perikanan 2017


Investasi Sektor Perikanan:

Rp4.83
Triliun


Nilai Ekspor Perikanan:

US\$4.52
Miliar


Kredit Investasi Perikanan:

Rp2.18
Triliun


PNBP SDA Perikanan:

Rp491.08
Miliar


Volume Ekspor Perikanan:

1.08 Juta
Ton

Sumber: BPS, KKP



Kunjungan Kerja Menko Bidang Kemaritiman

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kunjungan Kerja Menko Bidang Kemaritiman
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kunjungan Kerja Menko Bidang Kemaritiman

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Capaian Program Prioritas





KRI Dewaruci
Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemitriman



Pengelolaan Geopark Indonesia



Curug Awang, Geopark Ciletuh
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)

Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat.

Tujuan:

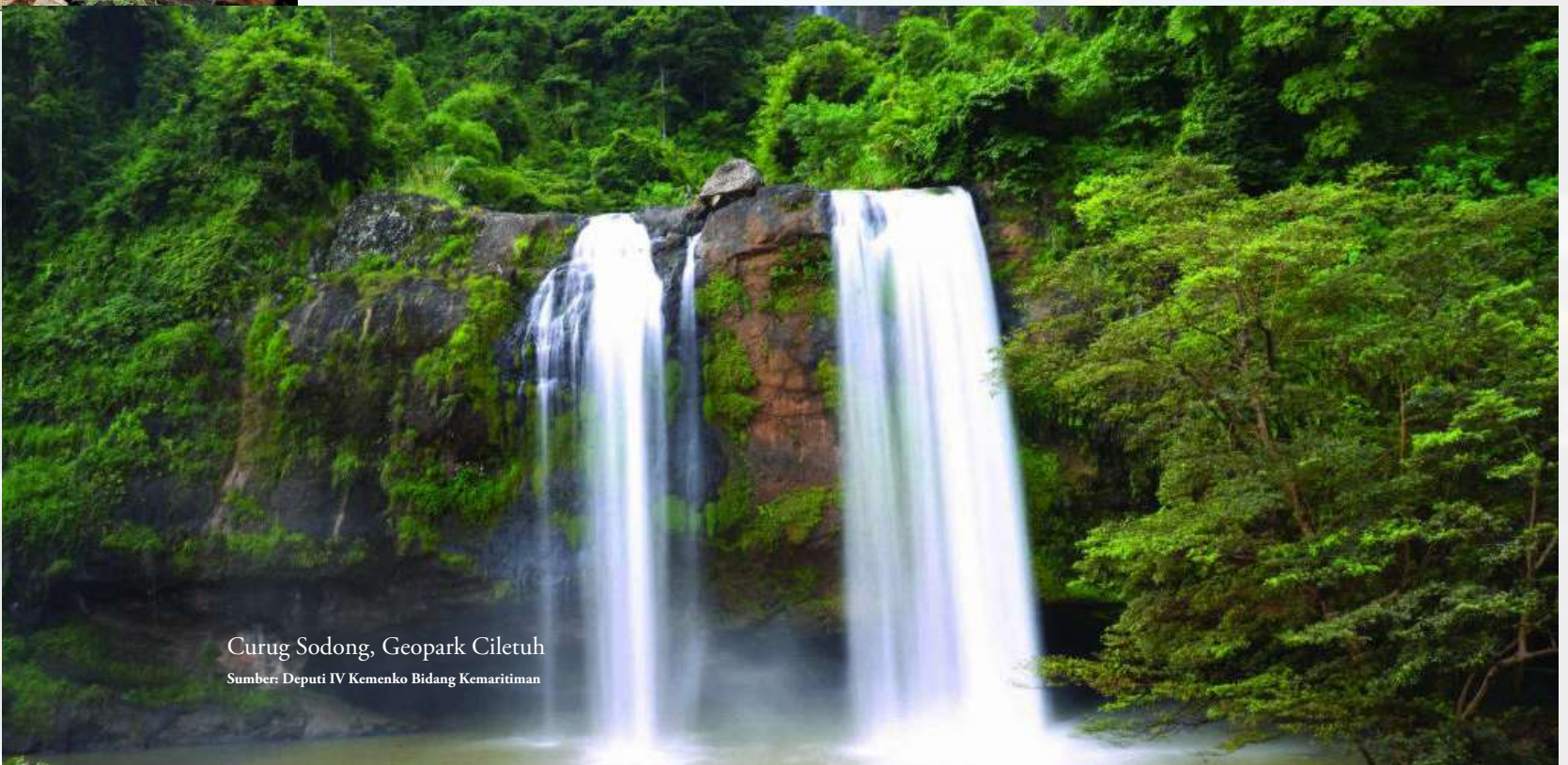
- Pelestarian
Pelestarian warisan kekayaan alam dan budaya
- Edukasi
Mempromosikan dan menyebarkan pemahaman mengenai kekayaan alam dan budaya
- Pembangunan Ekonomi-Sosial
Pemanfaatan dan peningkatan nilai ekonomi dari wilayah destinasi secara berkelanjutan

Manfaat:

Geopark bisa menjadi solusi alternatif pemanfaatan kekayaan alam dan budaya untuk kebangkitan ekonomi beserta pemberdayaan sosial yang merupakan kolaborasi dari semua kebijakan pelestarian dan perlindungan secara nasional.

Aspek Regulasi:

- **Perlindungan Warisan Geologi:** UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diturunkan dalam Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2016 dan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **Perlindungan Keanekaragaman Hayati:** UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan UU No.41/1999 tentang Kehutanan
- **Perlindungan Cagar Budaya:** UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya
- **Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata:** UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataaan. Perlunya pemanfaatan pariwisata alam untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran
- **Penataan Tata Ruang Nasional:** UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang. UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU Nomor 14/2014
- **Pengelolaan Kelautan Indonesia:** UU Nomor 32 Tahun 2014 Kelautan yang diimplementasikan melalui Perpres No 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia plus SDGs tujuan 14



Curug Sodong, Geopark Ciletuh
Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Peresean, Budaya Khas Lombok
Sumber: Qwadru P. Wicaksono

UNESCO Global Geoparks

Seiring dengan pesatnya penerapan konsep Geopark di berbagai belahan dunia, maka pada tahun 2015 melalui sidang umum UNESCO ke 38 di Paris pada tanggal 17 November 2015, Geopark secara resmi diakui sebagai salah satu program UNESCO bernama *International Geoscience and Geopark Program* (IGGP) dan Pedoman Operasional Geopark Global UNESCO sendiri termuat dalam Dokumen 38C/14 UNESCO.

Sejalan dengan telah diakuinya konsep geopark sebagai salah satu program UNESCO tersebut maka istilah *Global Geopark Network* (GGN) yang digunakan sejak tahun 2000 tersebut berubah nama menjadi *UNESCO Global Geopark* (UGGp). Saat ini terdapat 140 kawasan *UNESCO Global Geopark* yang tersebar di 38 negara dan diantaranya terdapat 4 kawasan *UNESCO Global Geopark* yang lintas negara.



Milestone UGG

1997

Konsep Geopark Mendunia

2000

Global Geopark Network resmi menjadi program UNESCO

2015

Berubah nama menjadi UNESCO Global Geopark

Jumlah UGG di Dunia

Eropa	
	72

Asia Timur	
China	31
Jepang	9
Korsel	3

Asia Tenggara	
	7
4 dari 7 terletak di Indonesia	

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Pulau Satonda, Geopark Tambora

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Gunung Rinjani, Geopark Rinjan

Sumber: Qwaden P. Witaksono

Status penetapan Geopark

- UNESCO Global
- Geopark Nasional
- Aspiring Geopark

Geopark di Indonesia

UNESCO Global Geopark	4
Geopark Nasional	7
Berpotensi menjadi Destinasi Geopark	80

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

“Setelah adanya pengakuan dari UNESCO, banyak dampak positif yang dirasakan. Mulai dari pembangunan jalan untuk akses ke Geopark Ciletuh-Palabuhanratu hingga memicu kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Ada yang berdagang warung makanan, warung kopi, maupun pembangunan homestay.”

Dana Budiman

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi/
GM UGG Ciletuh-Palabuhanratu



Sumber: Dok. Pribadi

Peta Kawasan Geopark di Indonesia



● 7 Geopark Nasional

1. Kaledra Toba
2. Merangin Jambi
3. Bojonegoro
4. Maros Pangkep
5. Tambora
6. Raja Ampat
7. Pulau Belitung

● 4 UNESCO Global Geopark

1. Batur (Bali)
2. Gunung Sewu
3. Ciletuh Pelabuhan Ratu
4. Rinjani Lombok

● 80 Potensi Geopark

- Jawa 51%
- Kalimantan 17%
- Nusa Tenggara 11%
- Maluku 2%

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Peluang Investasi dari Pengembangan Geopark

●	Sektor Perkebunan
●	Sektor Pertanian
●	Sektor Peternakan dan Perikanan
●	Sektor Jasa Asuransi
●	Sektor Industri UMKM
●	Sektor Industri Kreatif
●	Sektor Jasa Akomodasi/Perhotelan
●	Sektor Jasa Transportasi
●	Sektor Jasa Wisata
●	Sektor Kesehatan
●	Sektor Pendidikan
●	Sektor Olah Raga
●	Sektor Pengamanan
●	Sektor Hiburan/Rekreasi/Makanan



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Dampak Pengembangan Geopark

Pengembangan Geopark dapat memicu pembangunan infrastruktur dan fasilitas sektor-sektor lainnya di kawasan tersebut. Pembangunan pada kawasan tersebut diperlukan untuk mendukung keberlangsungan Geopark dalam memenuhi kebutuhan wisatawan maupun standar kualifikasi Geopark.

Ekonomi Berkelanjutan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam adalah salah satu nilai lebih dari Geopark. Sehingga pembangunan-pembangunan pada kawasan tersebut mengedepankan kepentingan *multistakeholder* dan tidak menitikberatkan pada pembangunan ekonominya saja.

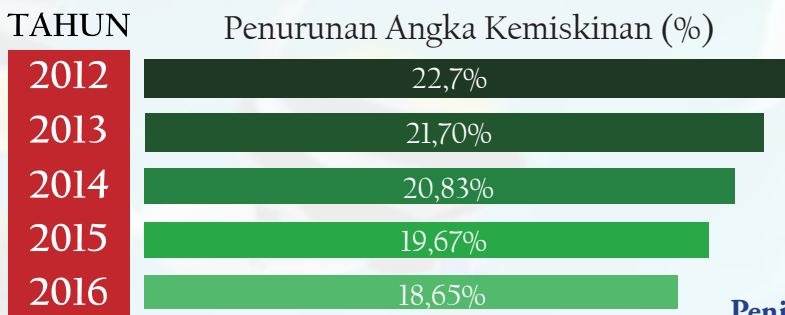
Peningkatan Kunjungan Wisata UGG Gunung Sewu

TAHUN	KUNJUNGAN	PAD	CAT
2012	2.011.359	8.808.327.620	
2013	2.244.023	10.949.458.225	GN
2014	2.750.907	20.911.092.777	
2015	3.934.881	21.263.578.352	UGG
2016	4.831.264	37.936.198.738	
2017	5.589.925	41.513.812.733	



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Pengaruh UGG Gunung Sewu pada Kab. Gunungkidul Penurunan Angka Kemiskinan



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Peningkatan Arus Investasi



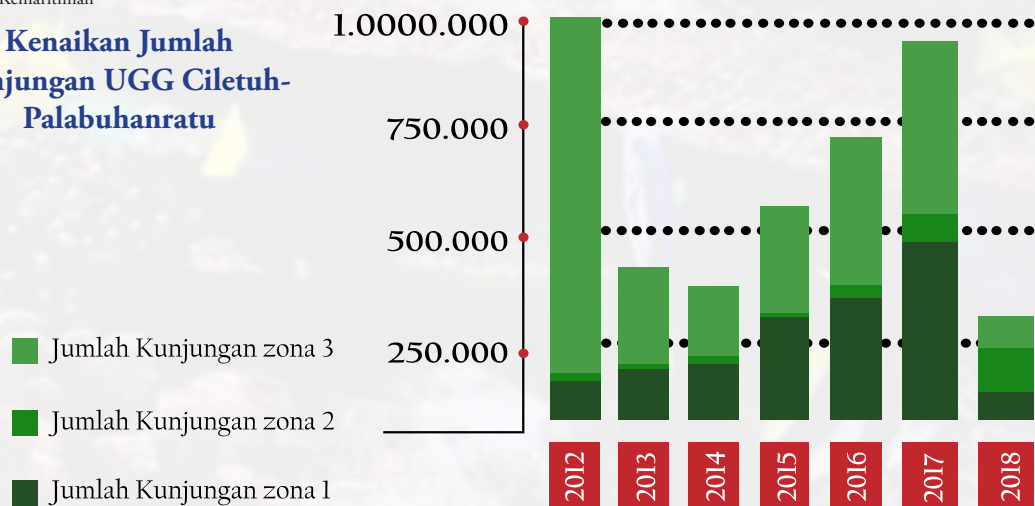
Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Pertumbuhan Homestay di UGG Ciletuh-Palabuhanratu

No.	Kecamatan	2016	2017
1	Cisolok	0	0
2	Cikakak	4	0
3	Pelabuhan Ratu	0	0
4	Simpenan	0	0
5	Ciemas	78	132
6	Waluran	4	4
7	Surade	0	0
8	Ciracap	27	32
Jumlah		113	172

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Kenaikan Jumlah Kunjungan UGG Ciletuh- Palabuhanratu



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Upacara Mulang Pakalem, Geoprak Rujani
Sumber: Koesnadi



Sumber: Deputy IV Kemenko Bidang Kemaritim



Sumber: Deputy IV Kemenko Bidang Kemaritim



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Kurikulum Muatan Kemaritiman

Pemahaman Dasar

Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim bekerja sama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan kurikulum khas muatan kemaritiman untuk tingkat pendidikan mulai PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK-Non Kemaritiman. Hal ini sebagai upaya terobosan untuk menanamkan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan keterampilan kemaritiman kepada generasi muda secara komprehensif, terstruktur dan berkelanjutan.

Kurikulum kemaritiman dikembangkan berdasarkan sejarah, nilai budaya dan potensi kemaritiman untuk membentuk cinta tanah air dan jiwa bela negara dalam rangka membangun kembali Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Fungsi dan Manfaat

Penyusunan Kurikulum Kemaritiman dilakukan sebagai bagian dari upaya diversifikasi kurikulum yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memasukkan lebih banyak muatan khas keilmuan dan keterampilan kemaritiman dalam proses pendidikan dalam rangka membangun dan menyiapkan sumber daya manusia kemaritiman Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan kemaritiman sangat diperlukan sebagai bagian dari revolusi mental bangsa Indonesia yang masih melihat bidang kemaritiman secara sempit. Visi Pemerintah Jokowi-JK yang telah menempatkan maritim sebagai sentral pembangunan Indonesia masa depan perlu didukung dengan penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkarakter serta memahami budaya maritim.

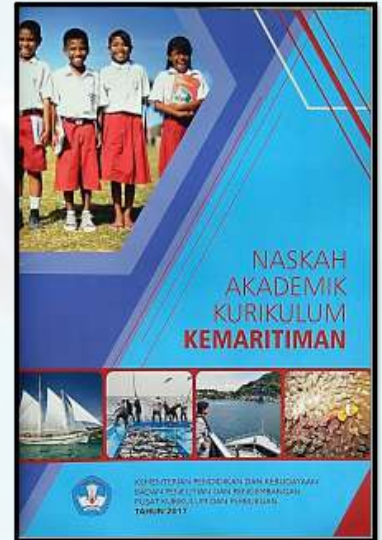
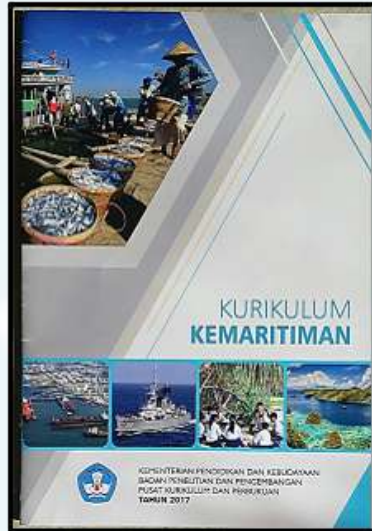


Implementasi Kurikulum Muatan Kemaritiman
Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Milestone Menuju Implementasi

No.	Waktu	Kegiatan
1	2016 – awal 2017	Dihasilkan dokumen kurikulum kemaritiman
2	4 Mei 2017	Nota Kesepahaman antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Kemendikbud
3	12 Mei 2017	Dihasilkan draft PKS
4	18-21 Mei 2017	Pameran Pekan Pendidikan dan Kebudayaan
5	7 Juni 2017	Draft PKS lebih mengerucut
6	21 Juni 2017	Surat dari Deputi 4 kepada Sekjen Kemendikbud
7	15 Agustus 2017	Penandatanganan PKS oleh Deputi IV dan Sekjen Kemendikbud ttg Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Kemaritiman

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Roadmap Implementasi

2017	Kurikulum Kemaritiman (3 dokumen)
	MoU (4 Mei)
	PKS (15 Agustus)
2018	Sekolah Percontohan di 13 Provinsi
	Pendampingan di Sekolah Percontohan
2018	Penambahan Jumlah Sekolah Percontohan (21 provinsi)
2019	Implementasi Secara Nasional Imbasan di 34 provinsi

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

13 Provinsi Lokasi Percontohan (2018)

- Aceh/Sabang
- NTB/Lombok
- Bengkulu
- NTT/Maumere
- Banten
- Kalimantan Utara/Tarakan
- Jakarta
- Sulawesi Selatan/Pangkep
- Jawa Barat/Cirebon
- Ambon
- Jateng/Tegal
- Raja Ampat/Waisai
- Jawa Timur/Surabaya

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Implementasi Kurikulum Muatan Kemaritiman
Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Sekolah Percontohan (2018)

Pada tahun 2018, kurikulum muatan kemaritiman diterapkan di 48 sekolah percontohan (12 PAUD, 12 SD, 12 SMP, 12 SMA/SMK) di 12 provinsi di Indonesia.

SABANG

- TK An –Nisa Sabang
- SDN 27 Sabang
- SMPN 5 Sabang
- SMKN 1 Sabang

BENGKULU

- TK Hangtuah Kota Bengkulu
- SDN 77 Kota Bengkulu
- SMPN 19 Kota Bengkulu
- SMAN 5 kota Bengkulu

BANTEN

- TKN Permata Hati Pandeglang
- SDN 4 Pandeglang
- SMPN 2 Sumur Banten
- SMAN 2 Pandeglang

DKI JAKARTA

- TK Hang Tuah II
- SD HANG Tuah 5
- SMP Hang Tuah 2
- SMA Hang Tuah 1

CIREBON

- TK Al Fath
- SD Negeri Panjunan Cirebon
- SMP Negeri 13 Cirebon
- SMA Negeri 5 Cirebon

SURABAYA

- TK Hang Tuah 7
- SD Hang Tuah 10
- SMP Hang Tuah 5
- SMA Hang Tuah 2

TARAKAN

- TK Hang Tuah Tarakan
- SD Negeri 012 Tarakan
- SMP Negeri 6 Tarakan
- SMA Hang Tuah

PANGKEP

- TK Binaan Pesona Bahari
- SD Negeri 7 Pangkep
- SMP Negeri 4 Pangkep
- SMK Perikanan Pangkep

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan di Sekolah Percontohan

LOMBOK TENGAH	MAUMERE	AMBON	RAJAAMPAT
<input type="checkbox"/> TK Negeri 2 Loteng	<input type="checkbox"/> TKK Terpadu Padre Annibale School	<input type="checkbox"/> TK Hang Tuah	<input type="checkbox"/> TK Baharai Kasih Waisi
<input type="checkbox"/> SD Negeri 4 Praya	<input type="checkbox"/> SD Inpres Kotauneng	<input type="checkbox"/> TK Penahi	<input type="checkbox"/> SD YPK Marthen Luther Yenbeser
<input type="checkbox"/> SMP Negeri 10 Pujut	<input type="checkbox"/> SMPN 3 Maumere	<input type="checkbox"/> SD Negeri II Ambon	<input type="checkbox"/> SMP Negeri 9 Raja Ampat
<input type="checkbox"/> SMA Negeri 1 Praya	<input type="checkbox"/> SMAN 1 Maumere	<input type="checkbox"/> SD Negeri 4 Halong	<input type="checkbox"/> SMA Negeri Raja Ampat
		<input type="checkbox"/> SD Negeri Latta	
		<input type="checkbox"/> SD Negeri Leahari	
		<input type="checkbox"/> SD Inpres 19 Ambon	
		<input type="checkbox"/> SMP Negeri 8 Ambon	
		<input type="checkbox"/> SMP Negeri 12 Ambon	
		<input type="checkbox"/> SMP Negeri 15 Ambon	
		<input type="checkbox"/> SMP Negeri 22 Ambon	
		<input type="checkbox"/> SMA Pertiwi Ambon	
		<input type="checkbox"/> SMA Negeri 12 Ambon	
		<input type="checkbox"/> SMK Negeri 8 Ambon	

Masing-masing sekolah telah memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

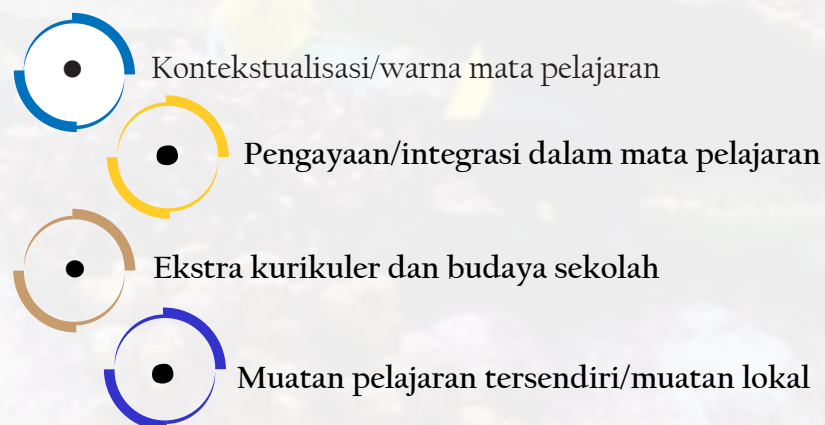
Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Karakteristik Kurikulum Kemaritiman

- Dimulai sejak usia dini
- Berlaku secara nasional
- Bersifat konstruktif, membangun rasa percaya diri dan kemampuan peserta didik
- Kekhasan rakyat Nusantara, didasarkan pada ideologi Pancasila serta sejarah dan budaya Indonesia sebagai bangsa maritim.
- Bersifat inovatif dan berwawasan lingkungan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam pengelolaan potensi kemaritiman berbasis inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan.
- Pendekatan secara komprehensif dan terstruktur
- Melalui pendidikan formal dan non-formal: PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Non Kemaritiman

Model Implementasi

Tidak Menambah Mata Pelajaran Baru, tetapi berupa:



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Contoh Pembiasaan Pembelajaran Dengan Kontekstual Kemaritiman

Kegiatan



- Menyanyikan lagu-lagu bertema kelautan
- Kunjungan ke instansi kemaritiman
- Kunjungan ke Objek Wisata Pantai dan Laut
- Mengundang Narasumber / Ceramah
- Pola Hidup Bersih dan Mengurangi Sampah Plastik
- Aksi Bersih Pantai dan Laut
- Pemutaran Video Kemaritiman
- Lomba dan Pameran hasil karya kemaritiman
- Penampilan Seni Budaya
- Latihan penggunaan alat keselamatan dan pengenalan rambu-rambu navigasi maritim
- Kampanye Gemar Makan Ikan



Tujuan

- Mengembangkan potensi dasar, berpikiran dan berperilaku untuk mewujudkan jiwa kemaritiman
- Memperkuat dan membangun karakter kemaritiman
- Meningkatkan rasa bangga terhadap potensi kemaritiman menanamkan jiwa patriotisme untuk menjaga wilayah Indonesia



“ SD kami kebetulan menjadi perintis integrasi kemaritiman. Kemudian kami diundang oleh Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) yang bekerja sama dengan Kemenko Kemaritiman untuk memaparkan apa yang telah kami kerjakan selama menjadi pilot project. Saya memaparkan apa yang telah kami laksanakan sebagai contoh penerapan kurikulum kemaritiman. ”

Agus Heri
Kepala Sekolah SD Tegalsari 04,
tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Implementasi Kurikulum Muatan Kemaritiman
Sumitro, Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Ekspedisi Nusantara Jaya



KRI Dewaruci, Ekspedisi Nusantara Jaya

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) merupakan kegiatan terpadu lintas sektor untuk membantu mempercepat pembangunan kemaritiman Indonesia melalui peningkatan wawasan kemaritiman untuk generasi muda serta penguatan konektivitas di pulau-pulau terdepan, terpencil dan wilayah perbatasan.

Tujuan

Meningkatkan wawasan kemaritiman generasi muda Indonesia dan menguatkan konektivitas antar pulau-pulau terluar dan terdepan di seluruh wilayah NKRI melalui keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat yang terdiri dari program kesehatan, pendidikan dan pelatihan, lingkungan, seni budaya dan program-program sosial kemasyarakatan lainnya.

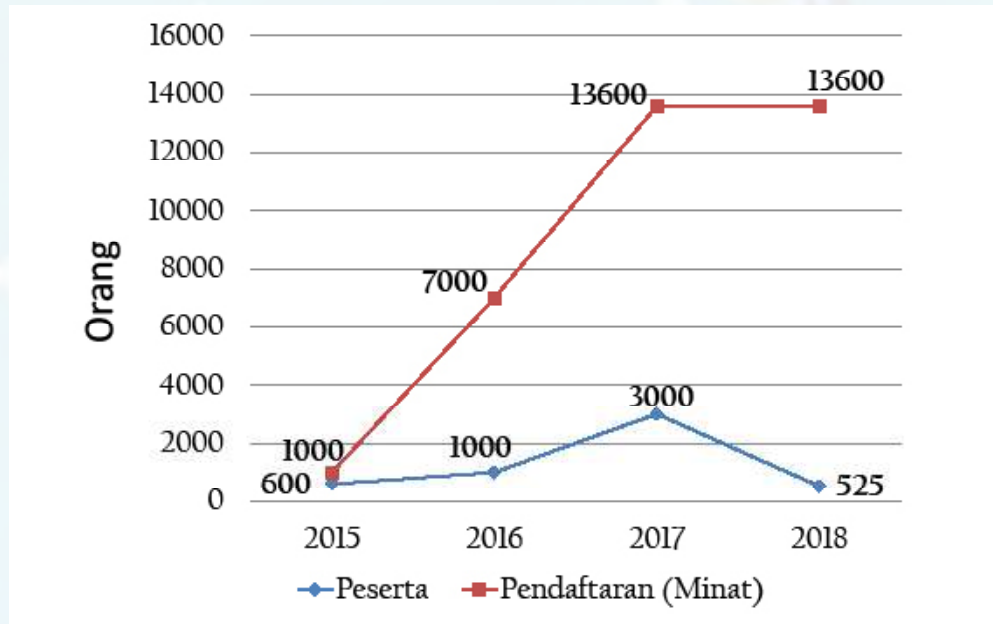
Output

Mendorong minat generasi muda Indonesia untuk mengenal potensi bahari, budaya dan pariwisata kepulauan serta menggali potensi pribadi, melatih kepemimpinan, melatih kepedulian sosial, meningkatkan bela negara, serta meningkatkan kecintaan terhadap pulau, dan dunia kemaritiman dengan melakukan pelayaran dan menetap di pulau-pulau serta bersentuhan dan turut serta dalam pembangunan masyarakat kepulauan.

Outcome

Meningkatnya minat, wawasan dan kecintaan generasi muda Indonesia pada dunia kemaritiman dalam mendukung program Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

Peserta ENJ Tahun 2015-2018



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Ekspedisi Nusantara Jaya
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



ENJ Tahun 2015

ENJ KRI Banda Aceh



Pelaksanaan
Juni – Oktober 2015



Total Jalur Lintasan
230.000 km



Rute Pelayaran
Jakarta–Makasar–
Sorong–Saumlaki–
Kupang–Jakarta



Kapal
KRI Banda Aceh, KRI
rumah sakit Dr. Share



Titik Singgah
5 Pelabuhan



Kegiatan:
Sosialisasi Wawasan Kemaritiman di Wilayah Sandar
Pertukaran Seni Budaya dari 34 Provinsi
Pelatihan Kemaritiman
Jiwa Korsa, Bela Negara dan Cinta Tanah Air



ENJ Kapal Perintis



Jumlah Kapal Perintis
86



Berangkat dari
35 Pelabuhan
Pangkal



Kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari :
Pendidikan
Kesehatan
Lingkungan
Ekonomi
Infrastruktur

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Ekspedisi Nusantara Jaya

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



ENJ Tahun 2016



ENJ Kapal Perintis



Jumlah Peserta
1.200 Orang



Jumlah Titik Lokasi Misi
37 Pulau



Perguruan Tinggi
28 Universitas



Provinsi
24



Kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari:

Pendidikan
Kesehatan
Lingkungan
Ekonomi
Infrastruktur

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Ekspedisi Nusantara Jaya

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



ENJ Tahun 2017



ENJ KRI Dewa Ruci



Jumlah Peserta
68 Pelajar SLTA



Rute Pelayaran
Jakarta – Sabang – Jakarta



Jumlah Provinsi
34



Wilayah Sandar
Batam, Sabang,
Belawan



Kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari:

Pelayaran 25 hari dengan KRI Dewa Ruci
Sosialisasi Wawasan Kemaritiman di Wilayah Sandar
Pertukaran Seni Budaya dari 34 Propinsi
Pelatihan Kemaritiman
Jiwa Korsia, Bela Negara dan Cinta Tanah Air

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



ENJ Kapal Perintis



Jumlah Peserta
3.000 Orang



Jumlah Perguruan Tinggi
34 PT



Jumlah Titik Lokasi Misi
115 Pulau



Kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari:

Pendidikan
Kesehatan
Lingkungan
Ekonomi
Infrastruktur

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

ENJ Tahun 2018



ENJ Kapal Perintis



Jumlah Peserta
525 Orang



Jumlah Perguruan Tinggi
21 PT



Jumlah Titik Lokasi Misi
20 Pulau



Kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari:

Pendidikan
Kesehatan
Lingkungan
Ekonomi
Infrastruktur

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Menko Bidang Kemaritiman membuka acara ENJ
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



“ ENJ itu mengajarkan agar saya agar terus bisa mencintai laut. Karena inilah kali pertama saya berlayar dengan kapal, apalagi dengan kapal Dewaruci. Dan, di situlah saya mengenal bahari. Berlayar dari Jakarta sampai ke Sabang saja sudah seluas ini. Apalagi dari Sabang sampai Merauke. Di sinilah pekerjaan rumah pemuda-pemudi kita untuk menggali potensi maritim. ”

Daniel Antonius Yolwen
Alumni ENJ KRI Dewaruci 2017,
Siswa SMAN 3 Merauke, Papua

“ Melalui kegiatan ini kita ingin agar masyarakat kembali untuk mencintai laut, kita ajak para generasi muda untuk mengunjungi pulau-pulau terluar dan terdepan di nusantara, dengan harapan agar mereka dapat melihat langsung dan dapat membantu masyarakat di sana dengan ilmu yang mereka miliki. ”

Safri Burhanudin
Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



KRI Dewaruci, Ekspedisi Nusantara Jaya
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



KRI Dewaruci, Ekspedisi Nusantara Jaya
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



KRI Dewaruci, Ekspedisi Nusantara Jaya

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum



Kilometer 0 DAS Citarum
Sumber: Istimewa



“Pembenahan total sampai selesai baik berupa revitalisasi lahan dan hal-hal berkaitan anak sungai, limbah pabrik kita lihat menyeluruh. Agar Citarum betul-betul bermanfaat bagi pertanian, air baku akan kembali bersih dinikmati untuk kehidupan”

-- Presiden Joko Widodo --

Sumber: Istimewa

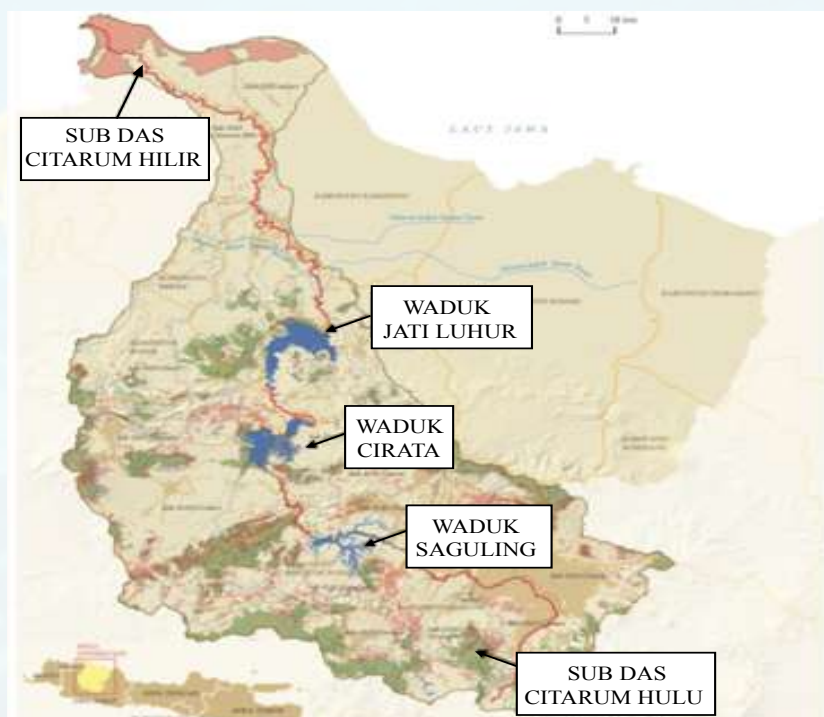
Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Itu sebabnya, perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, yang mengintegrasikan kewenangan antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Citarum.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Pemerintah juga telah membentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.



Profil Sungai Citarum



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Luas Daerah Aliran Sungai	1.132.334 m ²
Panjang Sungai	269 km
Debit Rata-Rata	5,7 miliar/m ³ /tahun
Urban Area	> 50%
Masyarakat Pemanfaat (Jabar & DKI)	27,5 juta
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1.880 MW
Sumber Air Minum Penduduk Jakarta	80%
Mengairi Lahan Pertanian	420.000 Ha
Jumlah Industri	2.822 buah

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Milestone Penataan DAS Citarum



Mengawal Perpres No. 15 Tahun 2018 sesuai TUSI
Kemenko Maritim

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

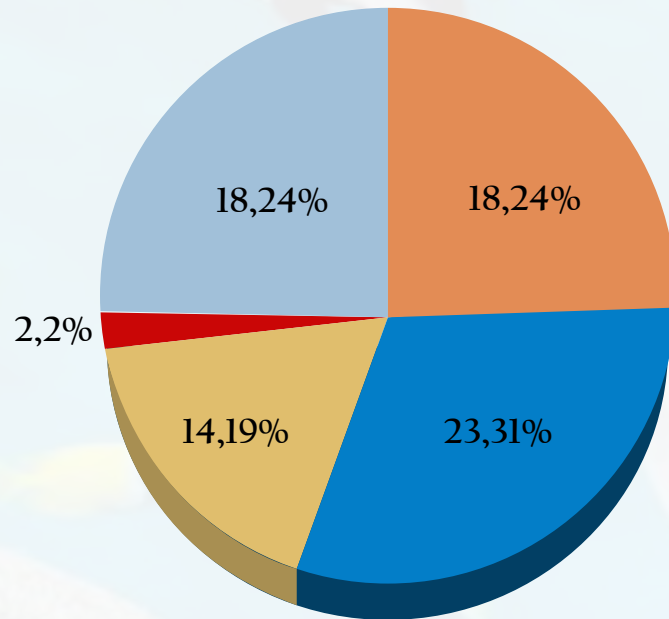
Program Aksi

NO	PROGRAM
1	Penataan Fisik Sungai: <ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan limbah fisik (Sampah dan tanaman air) • Pengerukan Alur (Pendangkalan dan penyempitan Alur) • Pembangunan Dam/tanggul sungai untuk mengatasi longsor • Normalisasi Sungai
2	Penanganan Kualitas Perairan: <ul style="list-style-type: none"> • Riset Kualitas Perairan • Penerapan Instalasi Pengolahan Limbah • Pengamanan dan pemeliharaan sumber air (waduk /situ)
3	Penataan Kawasan DAS Citarum: <ul style="list-style-type: none"> • Penataan bangunan sempadan Sungai (bangunan liar) • Reboisasi lahan terbuka • Pengaturan tata ruang DAS
4	Pembinaan masyarakat setempat dan pelaku industri sekitar lokasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan masyarakat untuk kebersihan, kegiatan pertanian ramah lingkungan • Sosialisasi Peraturan limbah kepada pelaku industri • Tata kelola sarana kebersihan masyarakat

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Program Prioritas



- Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan, dan Alih Profesi
- Pengelolaan Sampah Domestik
- Pengelolaan Sampah Industri
- Pengurangan Jumlah KJA dan Alih Profesi
- Penegakan Hukum

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

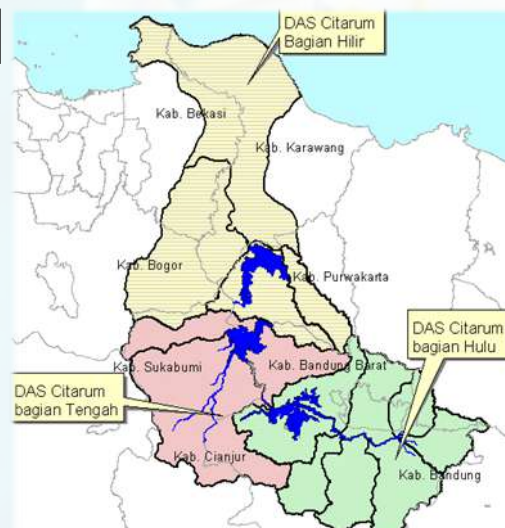
Lahan Kritis

Sangat Kritis	2.670,19 Ha
Kritis	76.877,82 Ha
Agak Kritis	166.571,80 Ha
Potensi Kritis	212.186,18 Ha

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Penanganan Lahan Kritis

Kegiatan	Status
Pembibitan	Bibit yang tersedia : 1.641.116 bibit (1.511.344 Budiasi & Dam III; 29.772 Arthagraha Peduli; 100.000 Disbun Jabar)
Reforestasi	Sudah dilakukan penanaman 655.377 bibit pohon di lahan seluas + 436,9 Ha
Pembuatan Terasering	Sudah dibuatkan terasering seluas 250 Ha
Pembuatan Lubang Biopori	Sudah dibuat 13.487 lubang di daerah hulu sungai



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Penanganan Limbah Domestik

Kegiatan	Status
Pengangkatan Sampah Permukaan	Sektor 6, 7, 8, 9 sudah 70% sampah anak dan cucu sungai sudah terelokasi Sudah dibuatkan jaring sampah secara swadaya masyarakat dengan tanggung jawab per-sektor
Pengadaan Infrastruktur sampah	<ul style="list-style-type: none"> • 9 unit TPS baru sudah dibangun, 1 mesin penghancur sampah dan 10 unit bak sampah • Sudah di uji coba 2 mesin incenerator di sektor 8 masih dilakukan penyempurnaan • Terbatasnya truk pengangkut sampah • Pembangunan TPS3R dan TPA masih menunggu perencanaan tahun 2019
Pengelolaan sampah tinja manusia dan kotoran ternak	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dibuatkan 63 unit WC komunal (dari target: 27.500 unit dan 25 Km pipa gendong) • Sudah dibuatkan Kolam Resapan & Vetiver untuk 1000 ekor sapi di daerah hulu (Dusun Citawa Kec. Kertasari)
Monitoring dan kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi sosial: Bagi masyarakat yang buang sembarangan sampah di sungai di minta bersihkan sungai 6 hari dan meminta tanda tangan minimal 50 warga sekitar

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman



Penertiban Karamba Jaring Apung

Waduk	Saguling	Cirata	Jatiluhur
Luas Maksimum (ha)	5.430	6.200	8.300
Kedalam Maksimum (m)	90	125	95
Altitude (m dpl)	625	250	110
Status Trofik	Hyper-Eutrofik	Hyper-Eutrofik	Hyper-Eutrofik

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Data Penertiban KJA

Waduk	Penertiban KJA (Petak)
Saguling	121
Cirata	4.325
Jatiluhur	9.932

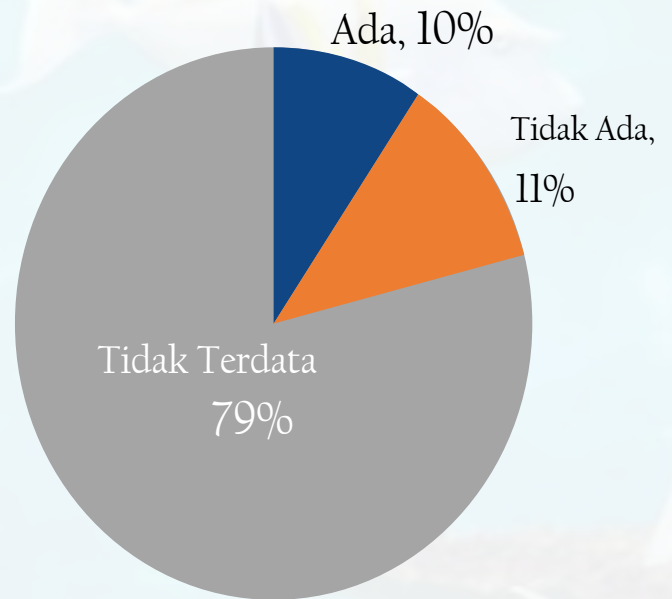
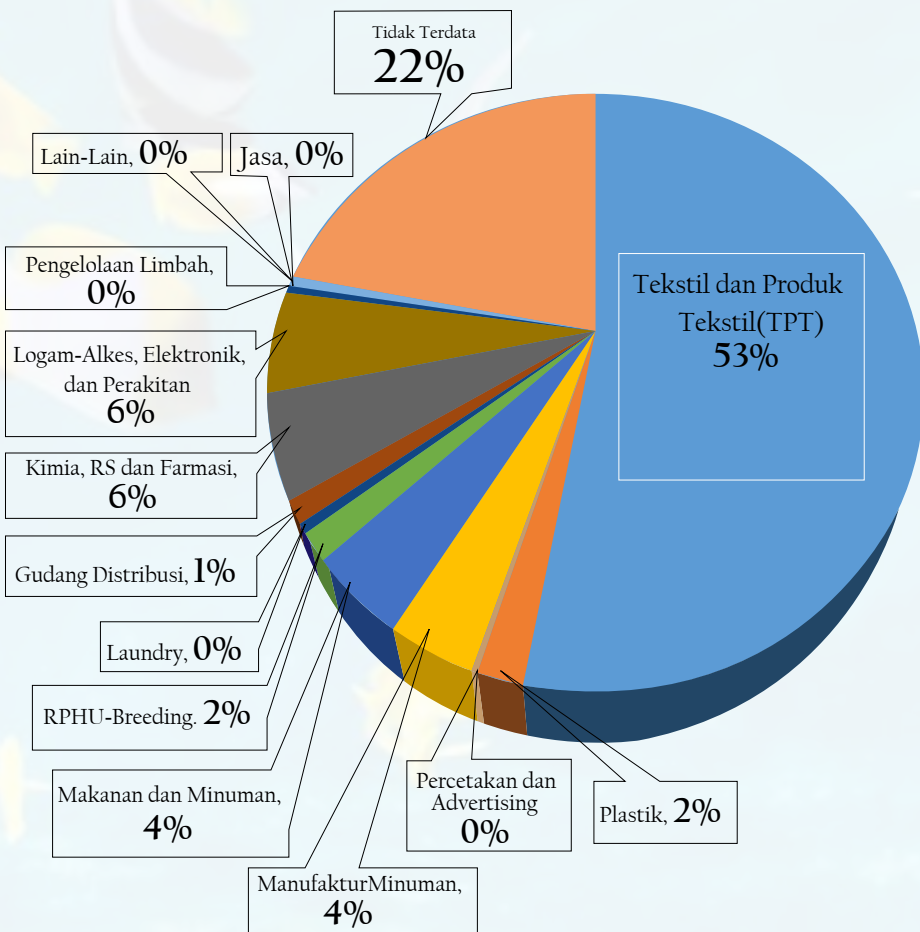
Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Penanganan Limbah Industri dan Penegakan Hukum

Kegiatan	Status
Sosialisasi kepada pelaku industri	<ul style="list-style-type: none"> Audiensi dengan pelaku industri tekstil di sepanjang DAS Citarum 31 Juli 2018
Pendataan Pelaku Industri	<ul style="list-style-type: none"> 1629 pelaku industri yang tersebar di sepanjang sungai Citarum 53% (831) Tekstil dan produk tekstil; 6% (91) Logam alkes, Elektronik dan perakitan; 22% (344) tidak terdata; sisanya lain-lain. Tidak punya IPAL = 185 (11%) dan Tidak terdata = 1.286 (79%)
Pendataan Pelaku Industri	<ul style="list-style-type: none"> Sidak bersama dinas/instansi terkait Ditemukan banyak perusahaan tidak punya IPAL/ IPAL tidak sesuai
Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Saluran limbah 73 Pelaku industri di Cor Paksa oleh satgas (termasuk saluran bypass dan siluman) 37 Pelaku industri kembali di buka karena bisa menunjukkan perbaikan

Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Keberadaan IPAL



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

“Setelah ada program Citarum Harum, ada perubahan menjadi lebih bersih dari sampah, adanya penertiban bangunan liar di sekitar daerah pinggiran DAS, membersihkan tanaman atau kebun liar sekitar DAS, membersihkan daerah pinggiran sungai dari aktivitas negatif.”

Edi Yusuf
Wiraswasta/Dalang, Tinggal di Cigosol,
Baleendah, Bandung (Sektor 7 DAS Citarum)



Sumber: Deputi IV Kemenko Bidang Kemaritiman

Archipelagic And Island States Forum



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Senior Official Meeting (SOM) Archipelagic and Island States (AIS) merupakan forum negara Kepulauan dan Negara Pulau yang diinisiasi Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembangunan yakni *United Nations Development Programme (UNDP)* sejak tahun 2017.

Latar Belakang

Inisiasi Pemerintah Indonesia membentuk AIS Forum dilatarbelakangi dampak atas pemanasan global yang mengancam eksistensi negara kepulauan dan negara pulau.

Tujuan

Untuk menjadi suatu platform kerjasama melalui saling tukar pengalaman dan informasi serta memberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait lingkungan khususnya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan cuaca di berbagai negara kepulauan dan negara pulau.



Dampak Pemanasan Global

Pada tahun 2009, Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan PBB melakukan analisis bahwa sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap pada 2030 sebagai dampak dari pemanasan global. Contoh dampak pemanasan global di Indonesia adalah tenggelamnya dua dukuh di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai dampak atas banjir rob di wilayah tersebut. Total luas wilayah Demak adalah 89.743 hektar dengan panjang pantai 34 kilometer, namun abrasi menggerus wilayah pesisir hingga wilayah Demak hilang mencapai 798 hektar.

AIS Forum 2017

Dampak pemanasan bumi merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh semua negara terutama negara pulau dan negara kepulauan. Untuk mengatasi hal ini, pada tanggal 21-22 November 2017, Indonesia mengambil inisiatif untuk memimpin pembentukan forum kerja sama konkret yang lebih erat antar negara-negara kepulauan dan negara pulau di seluruh dunia. Forum tersebut adalah Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau (1st SOM AIS).

Pada 1st SOM AIS tersebut dilakukan diskusi untuk menghasilkan solusi mengenai permasalahan riil yang dihadapi oleh negara kepulauan dan negara pulau, serta melakukan kunjungan ke berbagai lembaga seperti BMKG. Kemudian Pushidros-AL dan LIPI.

AIS Forum 2018

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri dari Negara Kepulauan dan Negara Pulau/ AIS Forum pada tanggal 4-8 Oktober 2018. Acara ini dihadiri peserta dari 46 negara pulau dan kepulauan kawasan Asia dan Afrika. Beberapa di antaranya adalah Mauritius, Saint Kitts and Navis, Inggris, Selandia Baru, Palau, dan Singapura.

“

Forum ini bukan sekedar seremoni, tapi kita ingin tawarkan berbagai solusi inovatif dan cerdas dalam bentuk saling tukar menukar pengalaman dan informasi, bantuan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai isu kelautan serta skema pendanaan proyek-proyek penanganan dampak perubahan iklim.”

Purbaya Yudhi Sadewa

Deputi Bidang
Koordinasi Kedaulatan Maritim

”



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Yang baru di 2nd SOM AIS tahun 2018:

- ▶ Solusi cerdas dan inovatif untuk mitigasi dampak perubahan iklim
- ▶ Penanggulangan terhadap penanganan sampah laut
- ▶ Pencurian ikan di laut
- ▶ Implementasi ekonomi biru yang secara teknis akan ditawarkan dalam forum
- ▶ Selain kerja sama lintas kementerian, yakni KLHK, KKP, Kemenhub, Kemenpar, Pushidros AL, BMKG, kerja sama SOM AIS juga melibatkan generasi muda LSM dan startup di bidang kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Setelah pelaksanaan 2nd SOM AIS, Pemerintah Indonesia dan UNDP menggelar pertemuan tingkat menteri negara-negara AIS pada tanggal 1-2 November 2018 di Manado, Sulawesi Tenggara. Para delegasi yang hadir antara lain dari Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris.

Pada forum tersebut dilakukan penandatanganan Deklarasi Manado yang berisi kesepakatan memperkuat komitmen kerja sama dalam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana, serta bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, hingga tata kelola maritim dan mendorong pengembangan tata kelola kelautan.





Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kematriman



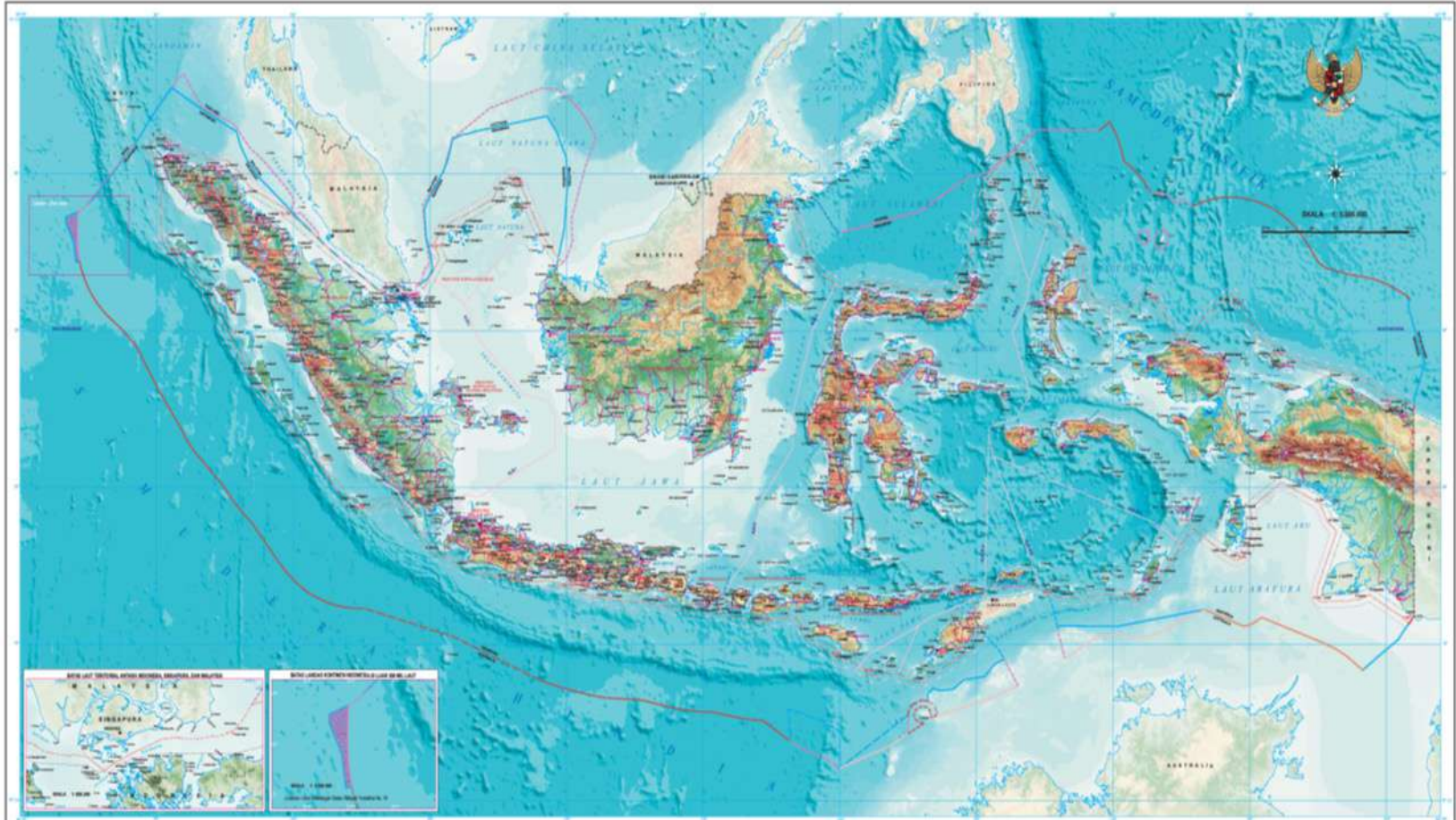
Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kematriman



Kegiatan AIS Forum
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kematriman



Rujukan Nasional Data Kewilayahan dan Pembaruan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia



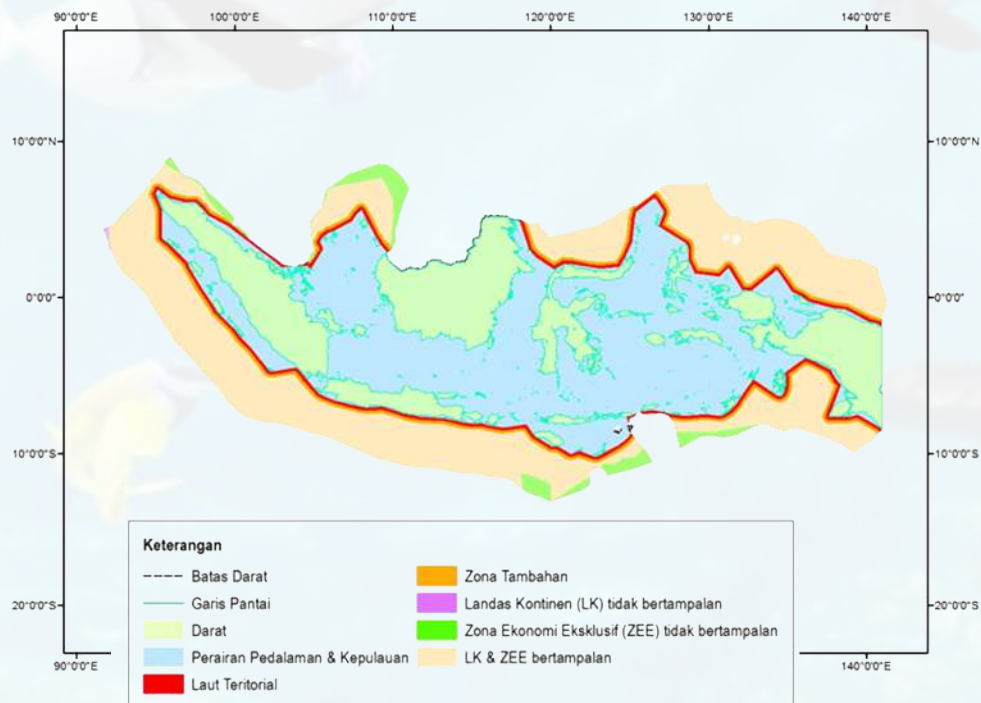
Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman

Sejak 2015, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkoordinasikan kementerian/ lembaga terkait. Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, sebagai instansi resmi pemerintah yang diberi mandat terkait bidang pemetaan dan informasi geospasial, menggawangi kajian teknis untuk membentuk sebuah rujukan nasional yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian teknis menggunakan best available data dan juga metode teknis terkini yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data kewilayahan ini akan terus didiseminasikan untuk dapat dijadikan rujukan nasional. Pemerintah juga terus mendorong setiap usaha pemutakhiran informasi geospasial nasional. Data rujukan ini akan diperbaharui secara berkala dengan mempertimbangkan ketersediaan data, kemajuan teknologi dan kebutuhan nasional.

Data

- Peta Rupabumi Indonesia
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia
- Peta Lingkungan Laut Nasional
- ENC (Electronic Navigational Chart)
- Data Citra Satelit



Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman

Metode Kartografi Digital

- Kompilasi best available data
- Digitasi (penutupan garis pantai pada mulut sungai)
- Harmonisasi (edge matching)
- Validasi (citra satelit dan data lainnya)
- Penghitungan luas kewilayahan dan panjang pantai menggunakan tools calculate geometri

Datum

- WGS 1984

Proyeksi

- Mercator, Equidistant Cylindrical, dan Cylindrical Equal Area

Software

- GIS Software dan ENC Tools

Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman



Luas Wilayah Maritim dan Panjang Garis Pantai

Komponen	Luas
Luas Wilayah Kedaulatan:	
Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan	3.110.000 Km ²
Laut Teritorial	290.000 Km ²
Luas Wilayah Berdaulat:	
Zona Tambahan	270.000 Km ²
Zona Ekonomi Eksklusif	3.000.000 Km ²
Landas Kontinen	2.800.000 Km ²
Luas Perairan Indonesia	6.400.000 Km²
Luas NKRI (Darat + Perairan)	8.300.000 Km²

Komponen	Panjang
Garis Pantai	108.000 Km

Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman

Jumlah Pulau

- Jumlah Pulau di Indonesia kurang lebih **17.504 pulau**
- Sampai dengan saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pembakuan dan submisi ke PBB sejumlah **16.056 pulau**
- Proses verifikasi dan pembakuan nama-nama pulau, masih terus berjalan dan menjadi salah satu **program prioritas nasional**

Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman

Pembaruan Peta NKRI

Pada tanggal 14 Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan acara penetapan pembaruan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017. Update Peta tersebut merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman. Penetapan peta dimaksud dilakukan dengan cara pemberian tanda tangan oleh 21 perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.

21 Perwakilan Kementerian/Lembaga

1. Kemenko Bidang Polhukam	11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kemenko Bidang Perekonomian	12. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kemenko Bidang Kemaritiman	13. Tentara Nasional Indonesia
4. Kementerian Dalam Negeri	14. TNI-AL
5. Kementerian Luar Negeri	15. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL
6. Kementerian Pertahanan	16. POLRI
7. Kementerian Hukum dan HAM	17. Badan Keamanan Laut
8. Kementerian Keuangan	18. Badan Informasi Geospasial
9. Kementerian ESDM	19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
10. Kementerian Perhubungan	20. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	21. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman

Dasar Penyempurnaan

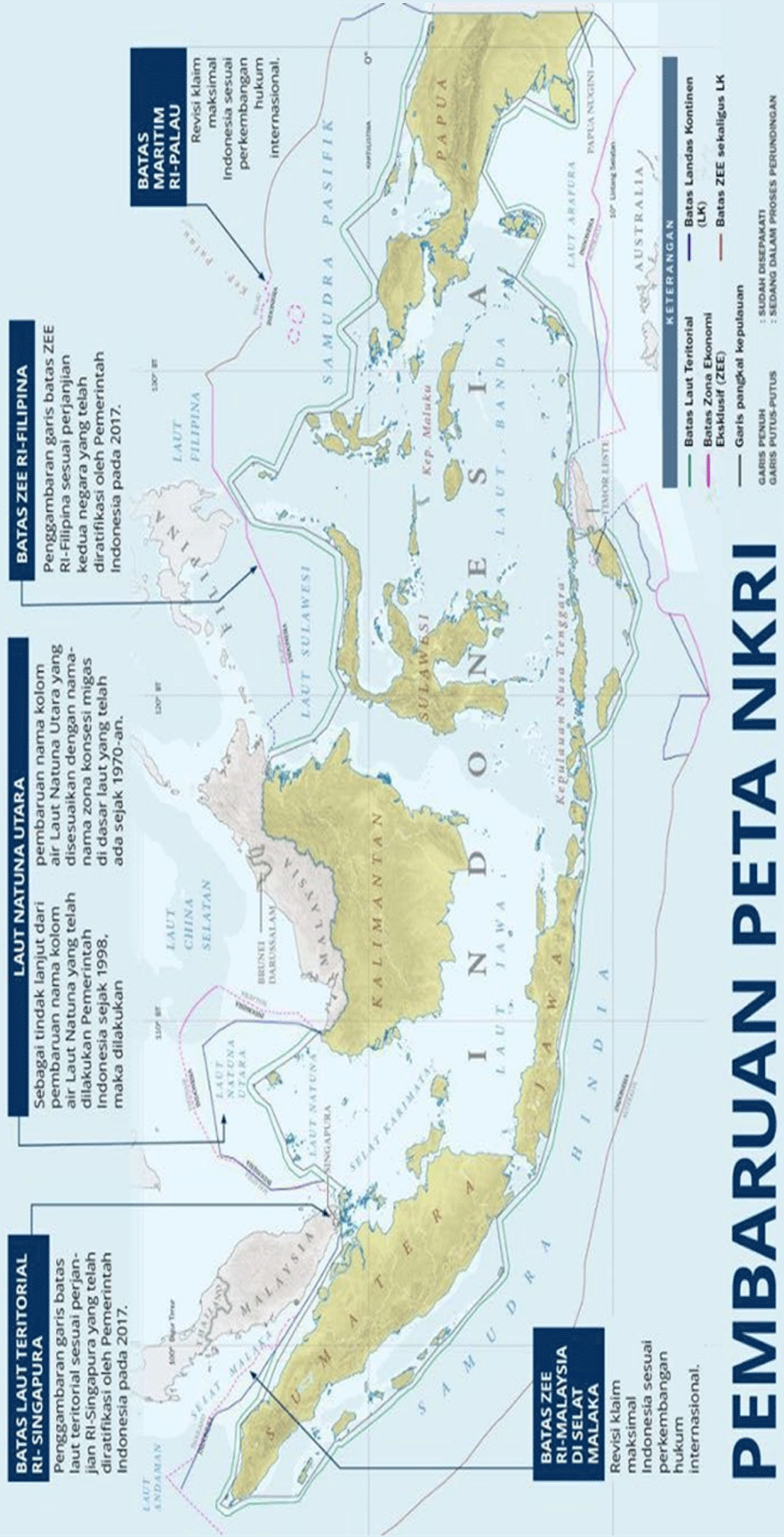
- Hasil putusan mahkamah arbitrase internasional atas sengketa Laut China Selatan
- Perkembangan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga
- Hasil pembaruan atas penamaan nama laut
- Penetapan batas zona ekonomi eksklusif
- Melibatkan tim perunding perbatasan maritim Indonesia
- Melibatkan pakar di bidang hukum laut internasional dan batas maritim

Tindak Lanjut

- Diseminasi peta terbaru secara luas
- Rujukan bagi penegakan hukum di laut
- Acuan pengelolaan sumber daya kelautan
- Bahan ajar pada seluruh tingkatan pendidikan



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



PEMBARUAN PETA NKRI

Sumber: Deputi I Kemenko Bidang Kemaritiman

Tol Laut



Sumber: Kemenhub

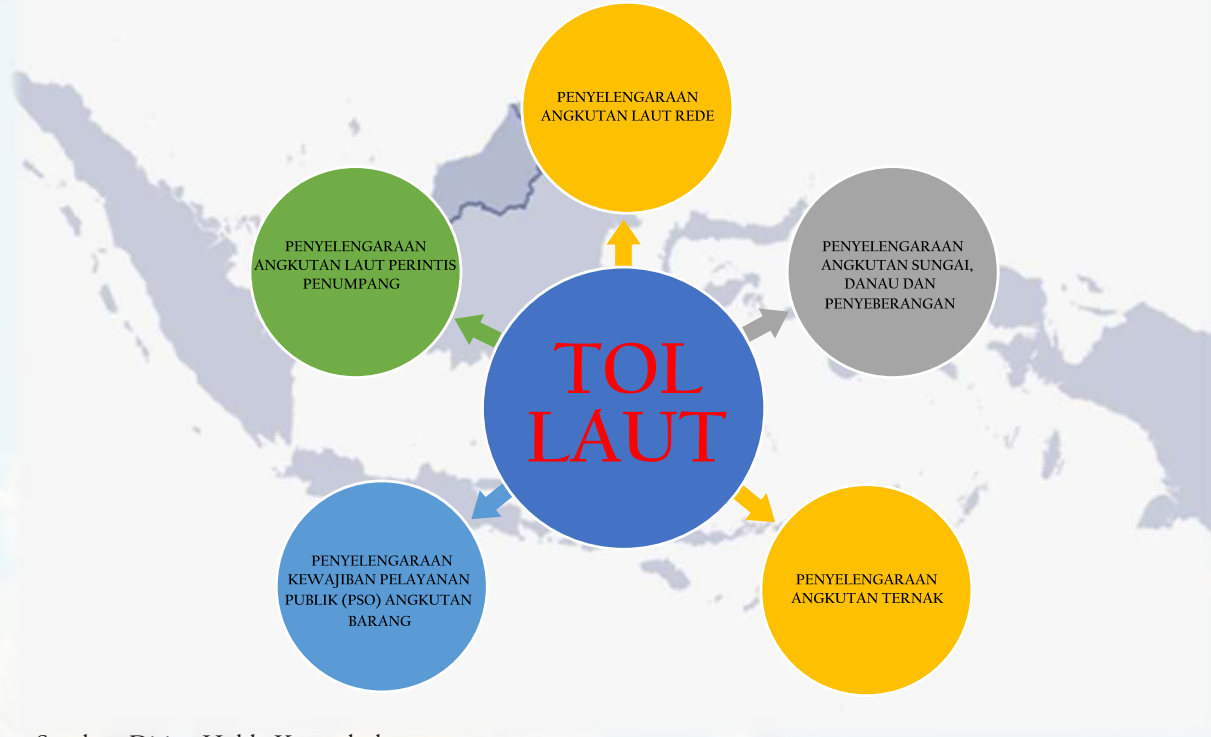
Sesuai dengan Perpres 106/2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, sasaran program tol laut adalah menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat dan memastikan kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan

Tujuan

Memastikan kehadiran negara dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, dan kemampuan terhadap bahan-bahan pokok di pulau-pulau terluar, khususnya di Indonesia bagian Timur. Manfaat tol laut terus diperbesar dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut serta terus meningkatkan trayek kapal tol laut, kapal perintis, kapal ternak, dan kapal pelayaran rakyat.



Penyelenggaraan



Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

Implementasi

Program tol laut sudah dilaksanakan selama tiga tahun dan dari semula hanya enam trayek, kini telah dioperasikan 15 trayek tol laut dengan tujuan meningkatkan ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga.

- 15 trayek tol laut: 6 trayek oleh Pelni, 2 trayek oleh ASDP, dan 7 trayek oleh swasta. Jumlah total anggaran: Rp.447.628.808.000,-
- Pelni telah mempunyai aplikasi untuk memonitor mutan kargo.
- PT. ASDP (Persero) sebagai feeder tol laut. Untuk kapal feeder ASDP tidak menggunakan lagi kapal Ro-Ro tetapi kapal kargo.
- Dua trayek baru PT. ASDP (Persero) rutte (T1, T3) dengan pelayaran via Teluk Bayur dan Tanjung Perak. Pengoperasian ke Pulau Sebatik telah menggunakan kapal ukuran 1.000 DWT.

Jumlah Trayek

2015	2016	2017	2018
3	6	13	18

Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub



Sumber: Kemenhub

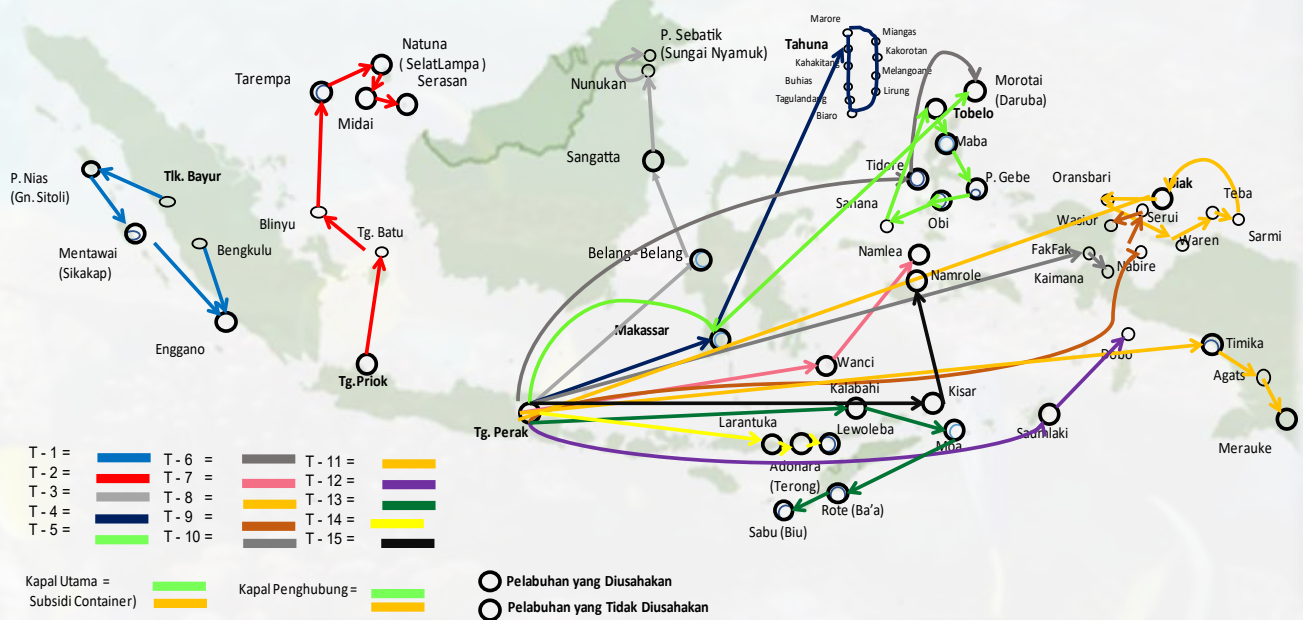
Peta Trayek

Trayek Penugasan Pelni = 6 Trayek (T-2,T-4,T-6, T-13, T-14, T1-5)

Trayek Penugasan ASDP = 2 Trayek (T-1, T-3)

Trayek Penugasan Djakarta Liyord = 3 Trayek (T-16, T-17 dan T-18)

Trayek Pelelangan Swasta = 7 Trayek (T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12)

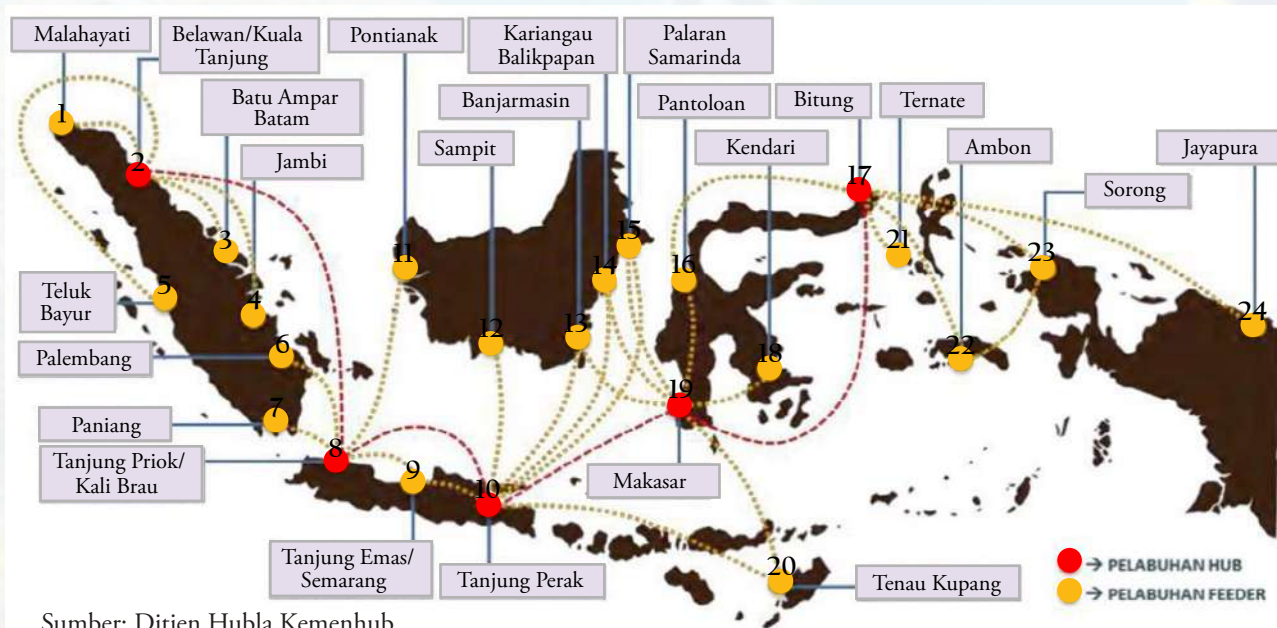


Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub



Sumber: Kemenhub

24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut



Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

“Sebelum ada program Tol Laut, masyarakat Banggai Laut, kalau mau beli sembako, harusnya ke Kabupaten Luwuk. Tapi sekarang kontainer sudah masuk ke kabupaten kita. Artinya, ketika mau pesan barang atau kirim barang, sudah relatif lebih mudah. Harga-harganya pun turun, hingga 10% lebih murah.”

Ardianto Abussalim
Kepala Desa Sarit, Bongan Kepulauan,
Banggai Laut, Sulawesi Tengah



Sumber: Dok. Pribadi

Jenis Barang yang diangkut

PASAL 2 AYAT 6		Perpres No 71 Tahun 2015	
BARANG KEBUTUHAN POKOK		BARANG PENTING	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beras 2. Kedelai Bahan Baku Tahu/Tempe 3. Cabe 4. Bawang Merah 5. Gula 6. Minyak Goreng 7. Tepung Terigu 8. Daging Sapi 9. Daging Ayam Ras 10. Telur Ayam Ras 11. Ikan Segar (Bandeng, Kembung, Tongkol, Tuna, Cakalang) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Benih 2. Pupuk 3. LPG 3 Kg 4. Triplek 5. Semen 6. Besi Baja Konstruksi 7. Baja Ringan 	

PASAL 3 AYAT 1		Permendag No 38 Tahun 2018	
JENIS BARANG LAINNYA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Mineral 2. Bawang Putih 3. Garam 4. Kacang Hijau 5. Kacang Tanah 6. Margarin 7. Mie Instan 8. Minuman Ringan 9. Oba - obatan 10. Sayuran 11. Susu 12. Teh 		<ol style="list-style-type: none"> 13. Kopi 14. Ikan Kemasan Kaleng 15. Biskuit 16. Pakaian Jadi 17. Popok Bayi dan Dewasa 18. Deterjen/Sabun/Pasta Gigi 19. Alat Tulis/Peralatan Sekolah 20. Gas ELPG 12 Kg 21. Pakan Ternak atau Pakan Ikan 22. Asbes/Gypsum 23. Paku 24. Seng 25. Aspal 	

Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub

Tren Penurunan Harga Barang

Penurunan Harga di Timika			
KOMODITI	HARGA SEMULA	HARGA SEKARANG	TREND PENURUNAN (%)
SEMEN 50 Kg	85.000	70.000*)	18
AYAM BEKU	35.000	29.000	17
BERAS CAP TAWON Kg	350.000	308.000	12
BERAS CAP SINTANOLA 25 Kg	320.000	275.000	14
TERIGU SEGITIGA BIRU 1 Kg	13.000	11.500	11.5
GULAKU 1 Kg	17.500	13.500	23

Penurunan Harga di Morotai

KOMODITI	HARGA SEMULA	HARGA SEKARANG	TREND PENURUNAN (%)
SEMEN 50 Kg	85.000	70.000*)	18
AYAM BEKU	40.000	34.000	15
TERIGU SEGITIGA BIRU 25 Kg	180.000	165.000	8.3
GULA SAK 50 Kg	630.000	570.000	9.5

Penurunan Harga di Merauke

KOMODITI	HARGA SEMULA	HARGA SEKARANG	TREND PENURUNAN (%)
AYAM BEKU	38.000	36.000/ekor	12.5
TEPUNG TERIGU 25 Kg	185.000	172.000	7

Penurunan Harga di Manokwari

KOMODITI	HARGA SEMULA	HARGA SEKARANG	TREND PENURUNAN (%)
AYAM BEKU	33.000	28.000	15
AQUA 600 ML	60.000	51.000	17
BERAS CAP TAWON 25 Kg	330.000	302.000	8
MINYAK GORENG BIMOLI 5 LTR	85.000	73.000	14

Penurunan Harga di Serui

KOMODITI	HARGA SEMULA	HARGA SEKARANG	TREND PENURUNAN (%)
AYAM BEKU	35.000	28.000	20
BERAS CAP SINTANOLA 25 Kg	320.000	265.000	17
TEPUNG TERIGU	185.000	170.000	8
PAKAN AYAM	420.000	385.000	8

Sumber: Pemda Kab/Kota - PIC, Kemendag



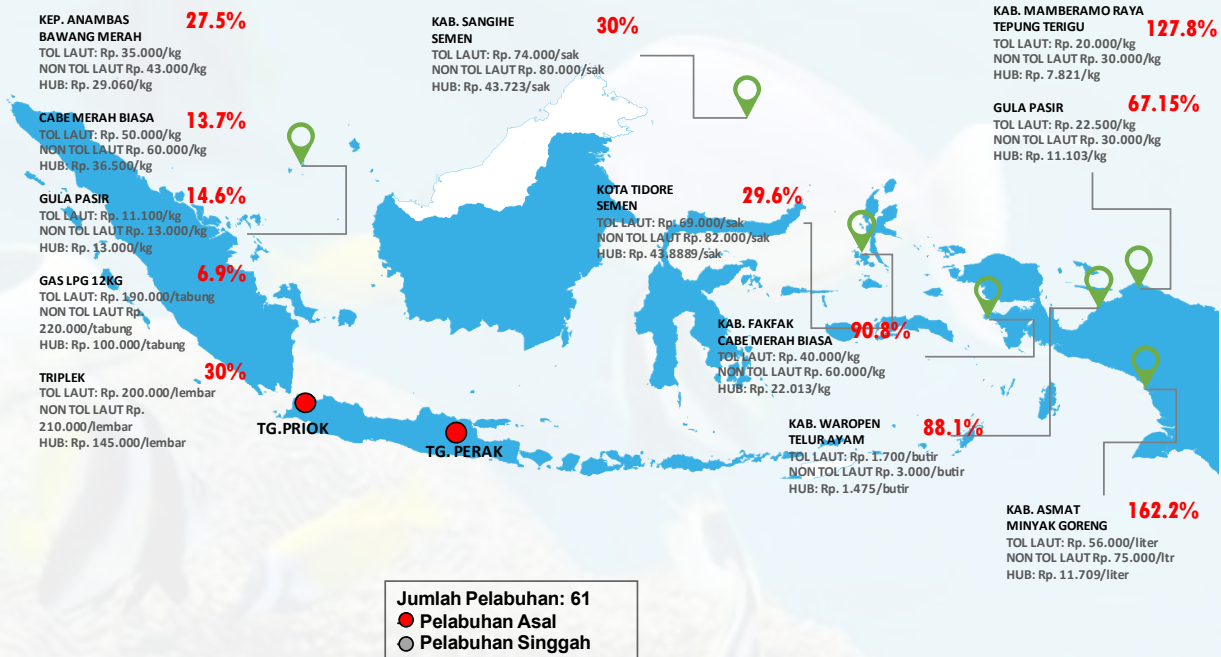
Sumber: Kemenhub



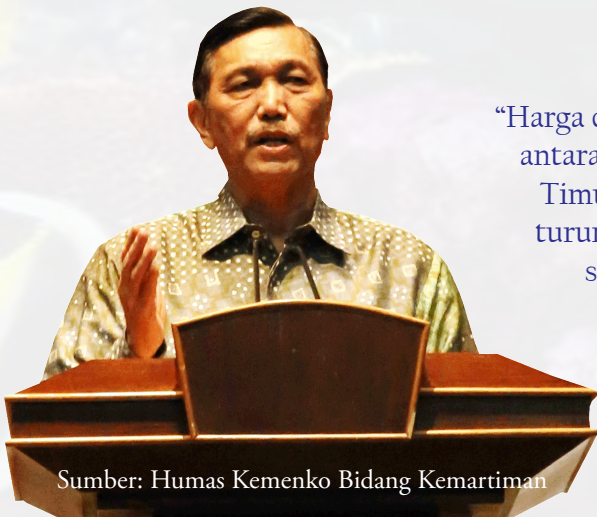
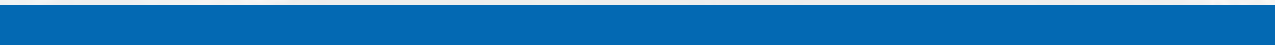
Peta Berkurangnya Disparitas Harga Barang

Penurunan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di beberapa daerah yang dilalui trayek Tol Laut periode Januari - Juli 2018.

Peta Penurunan Harga Barang (Januari - Juli 2018)



Sumber: Pemda Kab/Kota - PIC, Kemendag



“Harga di Indonesia timur, kami ambil sampling misalnya antara Surabaya dengan daerah terpencil di Indonesia Timur 20-25 persen harga sudah turun. Saya yakin turunannya disparitas harga ini lebih baik lagi, bisa sampai 50 persen pada 1-2 tahun ke depan.”

Luhut B. Pandjaitan
Menko Maritim

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemartiman



Bandara Internasional Jawa Barat



Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. BIJB diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Mei 2018 dan beroperasi secara komersial pada 8 Juni 2018. Secara keseluruhan bandara yang dikenal sebagai Bandara Kertajati dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar.

Runway (landasan pacu) yang telah dibangun sepanjang 2.600 meter x 60 meter dan saat ini sedang dilakukan perpanjangan landasan pacu menjadi 3.000 m x 60 m agar bisa melayani berbadan lebar seperti Airbus A380-800, Boeing 747 dan Boeing 777. Luas terminal yang telah dibangun 96.200 meter persegi dan akan dikembangkan hingga 209.500 meter persegi.

Bandara Kertajati bisa melayani 5,6 juta penumpang per tahunnya dan akan bisa menampung 18 juta lalu lintas penumpang pada periode berikutnya. Bandara pemilik *three letter code* KJT dengan nilai investasi Rp2,6 triliun ini ditargetkan bisa membuka 14 rute baik domestik ataupun internasional, termasuk layanan penerbangan ibadah Umroh.

Diresmikan Presiden 24 Mei 2018	Kode Bandara Three Letter Code KJT
Beroperasi Komersial 8 Juni 2018	Pesawat Terbesar Boeing 737
Nilai Investasi Rp2,6 Triliun	Pesawat Beroperasi 10 Pesawat
Penanggung Jawab PT Bandarudara Internasional Jawa Barat	Akses Bandara <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tol Cipali (Cikopo–Palimanan) ▶ Tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan)

Sumber: Kemenhub & PT BIJB

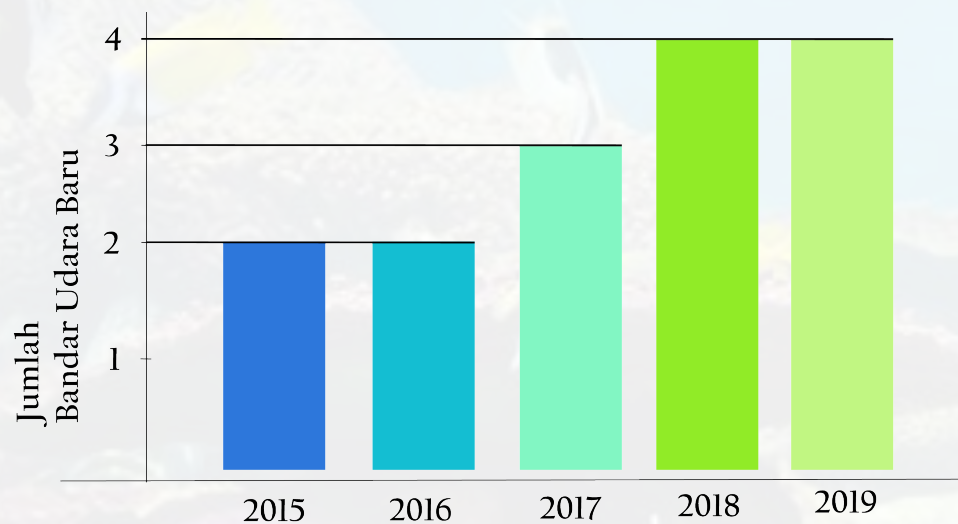


Spesifikasi Pembangunan BIJB

Deskripsi	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Ultimate
Luas Bandara	873 Ha			1.800 Ha
Landas Pacu	3.000 x 60 m (runway 1)	3.500 x 60 m (runway 1)	3.500 x 60 m (runway 1)	3.500 x 60 m (runway 1)
			3.000 x 45 m (runway 2)	3.000 x 45 m (runway 2)
Luas Apron	397.980 m ²	490.400 m ²	663.800 m ²	862.200 m ²
Luas Terminal	83.700 m ²	121.100 m ²	162.150 m ²	209.500 m ²
Kapasitas Terminal	5 juta penumpang/ Thn	8 juta penumpang/ Thn		18 juta penumpang/ Thn
Area Komersial	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Terminal Kargo	0,004 MT/ Thn	0,07 MT/ Thn	0,6 MT/ Thn	1,5 MT/ Thn

Sumber: PT BIJB

Pembangunan Bandara 2015 – 2018



Sumber: Kemenhub

10 Pembangunan Bandara Baru

Anambas	Maratua
Namniwel	Koroway Batu
Miangas	Kertajati
Morowali	Samarinda Baru
Werur	Tebelian

Sumber: Kemenhub

Peta Pembangunan Bandara



Sumber: Kemenhub



Sumber: BIJB



“Terkait infrastruktur, adapun ruang lingkup yang kami kerjakan adalah infrastruktur konektivitas jalan yakni transportasi laut, udara, darat dan lain lain, kemudian sistem logistik, infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran, perikanan dan pariwisata, serta industri penunjang infrastruktur, industri kapal dan lain-lain.”

Ridwan Djamaluddin
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Destinasi Pariwisata Prioritas



KSPN Labuan Bajo
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Di Indonesia, pengembangan sektor pariwisata telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Perkembangan pesat tersebut tidak lepas dari kerja keras para pemangku kepentingan, yang dilaksanakan melalui sejumlah program, termasuk Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Branding Wonderful Indonesia



Selama 2016, Wonderful Indonesia meraih 46 awards dari berbagai event di 22 Negara



Selama 2017, Wonderful Indonesia meraih 27 awards dari berbagai event di 13 Negara



Januari-Juni 2018, Wonderful Indonesia menerima 30 Penghargaan dari berbagai event di 8 Negara

Sumber: Kemenpar

Pendekatan Pengembangan Destinasi

Atraksi

- ⇒ Diversifikasi aktivitas wisata
- ⇒ Manajemen Pengunjung (Visitor management)
- ⇒ Sadar wisata

Aksesibilitas

- ⇒ Sarana (moda transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan kereta api)
- ⇒ Prasarana (pelabuhan laut, bandara, stasiun)
- ⇒ Sistem Transportasi (informasi rute dan jadwal, ICT, kemudahan reservasi moda)

Amenitas

- ⇒ Prasarana umum (Listrik, Air, Telekomunikasi, pengelolaan limbah)
- ⇒ Fasilitas Umum (keamanan, keuangan perbankan, bisnis, kesehatan, sanitasi dan kebersihan, khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, rekreasi, lahan parkir dan ibadah)
- ⇒ Fasilitas Pariwisata (akomodasi, rumah makan/restoran, informasi dan pelayan pariwisata, keimigrasian, TIC dan e-tourism kios, polisi pariwisata dan satuan tugas wisata, toko cinderamata, penunjuk arah-papan informasi wisata-rambu lalu lintas wisata, bentuk bentang lahan)
- ⇒ Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata

10 Destinasi Pariwisata Prioritas

25 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (PRIORITAS TAHUN 2015-2019)

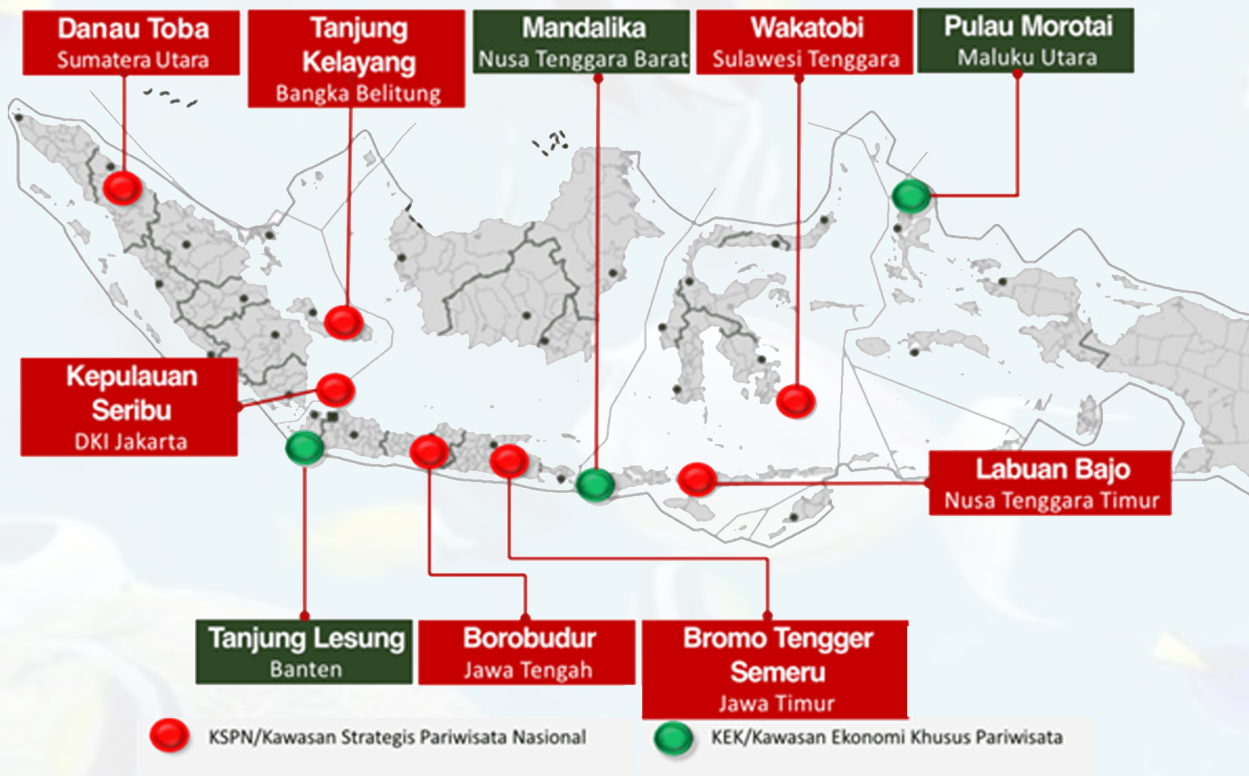
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA
DI INDONESIA

PRIORITAS
PEMASARAN
PARIWISATA
NASIONAL

10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

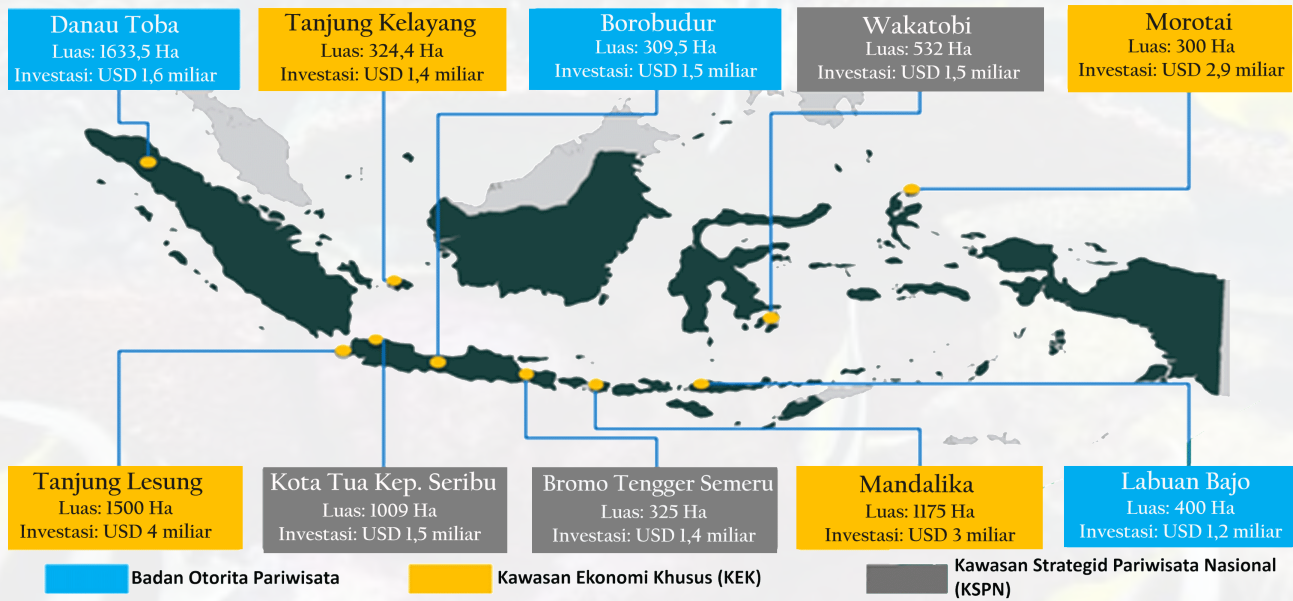
Sumber: Kemenpar

Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemartiman



Sumber: Kemenpar

Luas dan Investasi



Sumber: Kemenpar

Target Pasar 10 DPP

No	Destinasi Prioritas	Target Wisman	Target Wisnu
1	Danau Toba	ASEAN (Malaysia dan Singapura), EROPA (Belanda dan Perancis), Australia, Amerika)	Kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera Komponen destinasi
2	Tanjung Kelayang	Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, negara Eropa dan Timur Tengah	Kota-kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
3	Tanjung Lesung	Eropa, Asia Barat, Asia Tenggara, Australia, dan Amerika	DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan wilayah lain di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
4	Kota Tua Kep. Seribu	Cina, Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, Amerika, Inggris, Hongkong, Belanda, Jerman, dan Brunei Darussalam	Jakarta dan Pulau Jawa
5	Borobudur	Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, USA, Inggris, Hongkong, Belanda, Jerman, dan Brunei Darussalam	Penduduk seluruh wilayah Indonesia
6	Bromo Tengger Semeru	Malaysia, Singapura, Tiongkok, Jepang, negara Eropa dan Timur Tengah	Kota-kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali
7	Mandalika	Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Taiwan, Jepang, negara Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, Amerika Serikat	Penduduk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
8	Labuan Bajo	Australia, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Singapura, Thailand, Jepang, Tmor Leste	Kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan
9	Wakatobi	Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan negara-negara Eropa lainnya	Penduduk Pulau Jawa dan Sulawesi. DTW: TN Wakatobi (Pulau Wangiwangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomea, Pulau Binongko)
10	Morotai	Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Australia, negara-negara Amerika dan Eropa	Taman Laut Selat Morotai, Pulau Rao, Pulau Zum-zum

Realisasi Kunjungan Wisatawan

No	Destinasi Prioritas	Jumlah Wisman 2016	Jumlah Wisman 2017	Pertumbuhan (%)
1	Danau Toba	233.643	261.736	12%
2	Tanjung Kelayang	5.106	14.366	181%
3	Tanjung Lesung	281.758	N/A	-
4	Kota Tua Kep. Seribu	2.512.005	2.212.493*	-12%
5	Borobudur	23.303	32.876	41%
6	Bromo Tengger Semeru	220.570	239.411	9%
7	Mandalika	1.404.328	1.430.249 **	2%
8	Labuan Bajo	65.499	80.665***	23%
9	Wakatobi	15.939	16.718	5%
10	Morotai	1.304	734	-44%

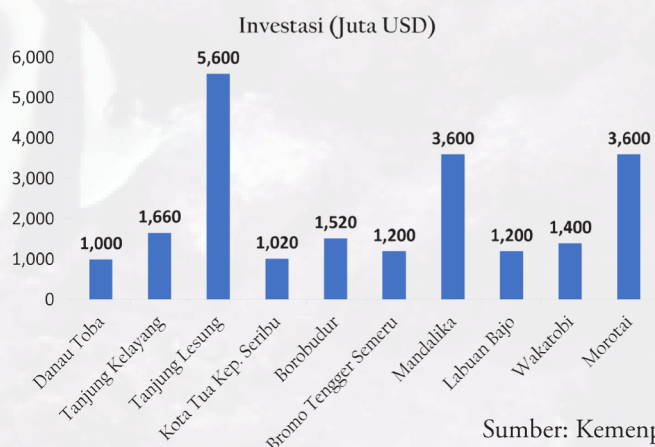
Sumber: Kemenpar

Performa 10 DPP

No	Destinasi Prioritas	YTD (%)	YTE (%)	Performa
1	Danau Toba	80,11	63,21	< 100%
2	Tanjung Kelayang	101,6	78,56	≥ 100%
3	Tanjung Lesung	100,3	67,31	≥ 100%
4	Kota Tua - Kep. Seribu	106,24	80,2	≥ 100%
5	Borobudur	93,92	56,79	< 100%
6	Bromo Tengger Semeru	96,3	68,65	< 100%
7	Mandalika	103,94	66,31	≥ 100%
8	Labuan Bajo	121,25	89,13	≥ 100%
9	Wakatobi	96,94	65,23	< 100%
10	Morotai	103,02	86,51	≥ 100%
	Total 10 DPP	100,3	72,2	≥ 100%

Sumber: Kemenpar

Proyeksi Capaian 2019



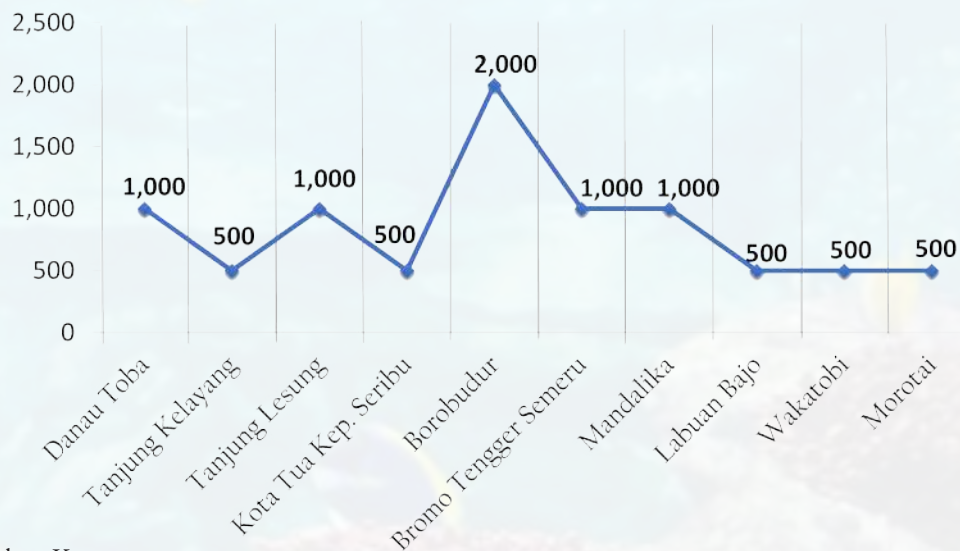
Sumber: Kemenpar

Wisman (Orang)



Sumber: Kemenpar

Devisa (Juta US)



Sumber: Kemenpar



Sumber: Humas Ditjenko Bidang Kemartiman

“Jadi kita tidak ikut membangun, tetapi ikut mendorong percepatan pembangunannya, seperti promosi wisata-wisata di Indonesia, promosi dalam membangun bandara di Indonesia, promosi pelayanan supaya wisatawan mudah masuk ke Indonesia. Ini semua sudah berjalan dan kami harapkan hasil yang semaksimal mungkin.”

Agung Kuswandono

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa



Aktivitas Gunung Bromo
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)



Parade Yacht di Wakatobi
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)



Kegiatan di Objek Wisata Wakatobi
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)



Pagi di Gunung Bromo
Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)



Penanganan Sampah Laut



Kegiatan Indonesian Youth Marine Debris Summit
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Dunia semakin menyadari sampah di laut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maupun ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan manusia. Di perairan Indonesia, akibat pencemaran sampah di laut, telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota maupun sumber daya laut. Itu sebabnya, pemerintah berkomitmen untuk menangani sampah laut (marine debris) sebesar 70% sampai dengan tahun 2025.

Keseriusan pemerintah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang ditetapkan pada 17 September 2018. Sebelumnya, Presiden juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Untuk penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025.

Oleh sebab itu, dibentuk Tim Koordinasi Nasional, yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ketua Harian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Nasional

Ketua	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Ketua Harian	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Luar Negeri 3. Menteri Keuangan 4. Menteri Perindustrian 5. Menteri Perhubungan 6. Menteri Kelautan dan Perikanan 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Menteri Kesehatan 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 10. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 11. Menteri Komunikasi dan Informatika 12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 14. Menteri Pariwisata 15. Sekretaris Kabinet 16. Kepala Badan Keamanan Laut




Tugas Tim Koordinasi

- ① Mengoordinasikan kegiatan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dalam kegiatan penanganan sampah laut.
- ② Merumuskan kebijakan penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut.
- ③ Mengoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

Strategi Rencana Aksi

- Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan
- Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat
- Penanggulangan sampah di pesisir dan laut
- Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum
- Penelitian dan pengembangan

Perkembangan Marine Debris

-  Telah ditetapkan Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut pada 17 September 2018.
-  Sedang dilakukan kajian kebijakan insentif pengurangan penggunaan kantong belanja plastic pada ritel besar.
-  Penerapan zero waste event dalam berbagai kegiatan nasional dan internasional di Indonesia melalui sosialisasi dan pelibatan berbagai komunitas dengan payung kegiatan GNRM Gerakan Indonesia Bersih.

Implementasi Kegiatan Tahun 2017

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Rapat Pembahasan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Sampah Plastik Di Laut	20-24 Februari	Bali
2.	Survei Kesiapan Daerah, Infrastruktur dan Kebijakan Daerah Untuk Pengelolaan Sampah Laut Untuk Kota Pilot Project Marine Debris	5-8 April	Balikpapan
3.	Survei Kesiapan Daerah, Infrastruktur dan Kebijakan Daerah Untuk Pengelolaan Sampah Laut Untuk Kota Pilot Project Marine Debris	5-8 April	Makassar
4.	Kajian Sampah Lintas Batas Pulau Terluar Dan Terdepan Indonesia (Studi Kasus Pulau Nipah)	4-7 April	Kepri
5.	Berperan Aktif Pada UN Ocean Conference To Support The Implementation Of SDG 14	4-10 Juni	New York
6.	Penyelenggaraan International Symposium On Marine Plastic Debris Solution	7-10 Agustus	Makassar
7.	Penyelenggaraan The Alliance For Marine Plastic Solution (Amps) Forum	4 September	Bali
8.	Pelaksanaan APEC High Level Meeting On Accelerating Waste Management Solution To Reduce Marine Litter	5 September	Bali
9.	Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Laut	31 Agustus	Jakarta
10.	Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Peraturan Presiden Pengelolaan Sampah Plastik Di Laut	6 Oktober	Jakarta
11.	Kunjungan Lapang Dalam Rangka Koordinasi Iptek Maritim Untuk Mendukung Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab Di Area Perkantoran	31 Oktober - 1 November	Bekasi
12.	Rapat Koordinasi Bisnis Model Sampah Laut	6 Oktober	Jakarta
13.	Rapat Koordinasi Survei Hotspot Assesment Marine Plastic Debris World Bank	23 November	Jakarta
14.	Pelaksanaan Workshop Plastic Debris For Tar Road	21-22 Desember	Jakarta

Sumber: Deputi IVKemenko Bidang Kemaritiman





Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)

“Sangat penting bagi kami untuk memperoleh dukungan dan sinergi berbagai kerja sama, terutama dalam pengelolaan sampah plastik di laut yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia.”

Luhut B. Pandjaitan
Menko Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)

MARINE DEBRIS SUMMIT

JAKARTA | OCTOBER 24 - 29, 2017

SPONSORED BY



SUPPORTED BY



MEDIA PARTNER



ORGANIZED BY



ORGANIZED BY



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman





Sumber: Humas Kemenko Bidang Kematriman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kematriman



Light Rail Transit (LRT)



Pembangunan LRT Jabodebek
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman




Pembangunan infrastruktur Kereta Api Ringan atau *Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) merupakan proyek transportasi berbasis rel dengan detail kompleks dan skala yang sangat besar. LRT Jabodebek dibangun untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk Jakarta dari kota-kota satelit di sekitarnya. Diharapkan dengan dibangunnya moda transportasi LRT Jabodebek bisa meminimalisir kemacetan di tol Jakarta – Cikampek (Japek) dan Jagorawi.

Proyek LRT Jabodebek merupakan salah satu program prioritas nasional. Terutama untuk menjawab tuntutan masyarakat akan transportasi umum yang aman, nyaman dan memiliki ketepatan waktu yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan dan mengurai kemacetan Jalan Tol Jakarta Cikampek, serta Jalan Tol Jagorawi.

Sementara itu, di samping proyek LRT Jabodebek, pemerintah juga telah mewujudkan proyek pembangunan LRT Sumatera Selatan. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun guna mendorong peningkatan perekonomian daerah Sumatera Selatan. Moda transportasi publik tersebut telah digunakan pada perhelatan ASIAN Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang.

Kemajuan LRT Jabodebek

Pembangunan infrastruktur LRT Jabodebek dibagi dalam dua tahap. Saat ini proyek LRT Jabodebek yang sedang berjalan adalah tahap I yang diperkirakan akan rampung tahun 2019 mendatang. Adapun LRT Jabodebek tahap I terdiri dari 3 lintas layanan yaitu Lintas layanan 1 Cawang-Cibubur, Lintas Layanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, Lintas Layanan 3 Cawang – Bekasi Timur.

-  Pelaksana LRT – ADHI ditugaskan untuk membangun prasarana LRT.
-  Operator LRT – KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana LRT oleh Pemerintah dan memperoleh konsesi dari Pemerintah atas prasarana LRT.
-  KAI melakukan pembayaran atas prasarana LRT kepada ADHI sesuai dengan perkembangan proyek Dalam rangka pembayaran kepada kontraktor (ADHI), Pemerintah memberi bantuan kepada operator (KAI) dalam bentuk PMN PSO serta jaminan untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan skema yang kompetitif dari bank.

Tahapan Kerja

No.	Tahapan	Jaktim (8 bidang = 3.188 M ²)	Jaksel (18 bidang = 7.582 M ²)	Depok (3 bidang = 4.369 M ²)	Bekasi (51 bidang = 9.525 M ²)	Kab. Bekasi (191 bidang = 117.525 M ²)
1	Penetapan Lokasi oleh Gubernur	√	√	√	√	√
2	Permohonan ke Kanwil BPN	√	√	√	√	√
3	Penugasan Kantah	√	√	√	√	√
4	Pembentukan P2T	√	√	√	√	√
5	Pembentukan Satgas A dan Satgas B	√	√	√	√	√
6	Inventarisasi dan Identifikasi	√	√	√	√	√
7	Penyusunan Daftar Nominatif & Peta Bidang serta Pengumuman	√	√	√	√	√
8	Masa Sanggah Pengumuman (14 hari kerja)	√	√	√	√	√
9	Penetapan KJPP	√	√	√	√	√
10	Penaksiran Ganti Kerugian oleh KJPP	√	√	√	√	√
11	Reviu oleh BPKP	√	√	√	-	-
12	Musyawarah Bentuk Ganti Rugi	√	√	√	-	√
13	Pemberian Ganti Kerugian	√	-	√	-	-
14	Pelepasan Hak	√	-	√	-	-
15	Penyerahan Hasil	-	-	√	-	-

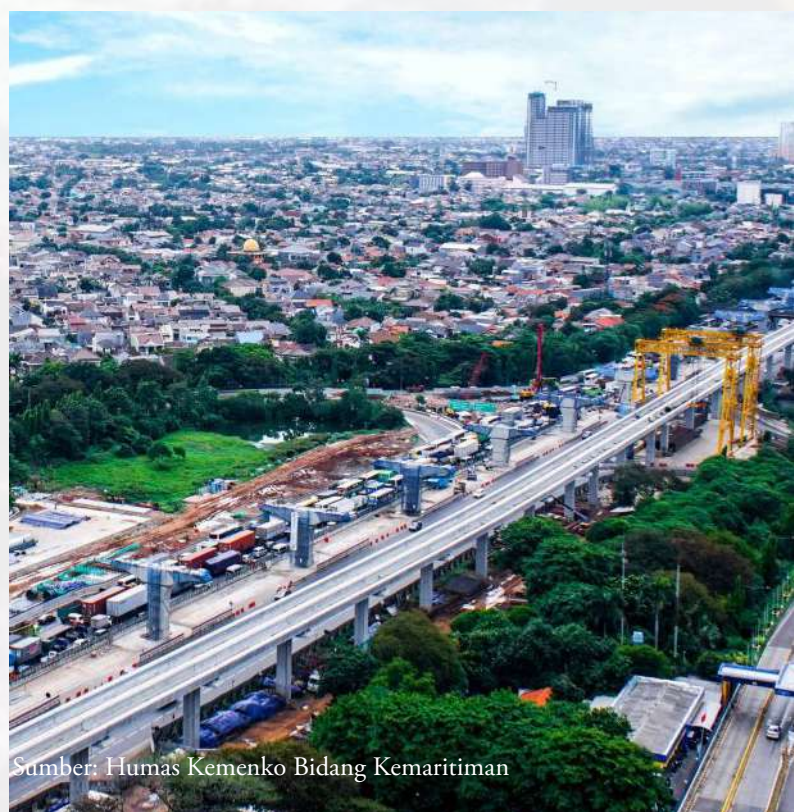
Panjang Lintasan

Total Panjang Lintasan LRT: 82,93 Km
6 Services Line LRT Jabodebek:

- Fase 1: 44,43 Km
 - Cawang – Cibubur: 14,89 Km
 - Cawang – Kuningan: 11,05 Km
 - Cawang – Bekasi Timur: 18,49 Km

- Fase 2: 38,5 Km
 - Dukuh Atas – Palmerah – Senayan: 7,8 Km
 - Cibubur – Bogor: 25,0 Km
 - Palmerah – Grogol: 5,7 Km

Sumber: PT. Adhi Karya



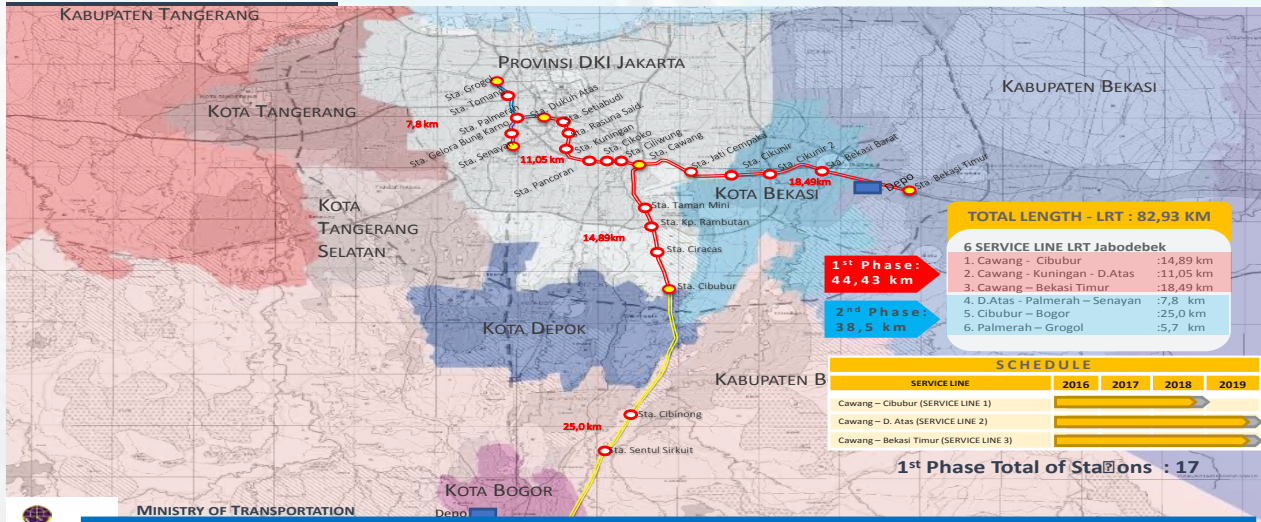
Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Perkembangan Proyek



Sumber: PT. Adhi Karya

Peta Lintasan



Sumber: PT. Adhi Karya



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Realisasi LRT Sumatera Selatan

Keberadaan LRT Sumsel dinilai dapat menjadikan gaya hidup baru bagi masyarakat, khususnya di Kota Palembang. Mulai dioperasikan sejak Juli 2018, LRT Sumsel juga telah dimanfaatkan untuk transportasi pada saat Asian Games yang dilaksanakan Agustus 2018 lalu.

Secara persentase, seluruh kegiatan konstruksi LRT Sumatera Selatan yang belum selesai tidak sampai 1%. Dalam hal ini, infrastruktur transportasi publik tersebut telah beroperasi dan terus dalam proses penyempurnaan.

- Sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018, realisasi pekerjaan konstruksi telah mencapai 98,095%
- Pekerjaan konstruksi sipil stasiun (13 stasiun) sebagai bagian dari fasilitas prasarana LRT telah selesai semua
- Dari 13 stasiun yang telah selesai konstruksinya, 8 stasiun sudah beroperasi dan melayani kebutuhan prasarana, namun 5 stasiun lainnya belum dapat beroperasi karena masih dalam tahap penyempurnaan fasilitas
- Secara umum, LRT sudah beroperasi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa pekerjaan minor seperti finishing, penyempurnaan lainnya dan perbaikan minor

Faktor keamanan penumpang menjadi perhatian petugas mengingat masyarakat yang belum terbiasa menggunakan LRT. Pemanfaatan tertinggi LRT oleh masyarakat masih untuk liburan keluarga. Adapun harga tiket Rp5.000 pada hari kerja dan Rp10.000 pada hari libur. Sistem pembayaran bagi penumpang LRT Sumsel dapat dilakukan dengan tiket yang disediakan di loket maupun menggunakan e-money.

“ Saya sering bolak-balik ke bandara, karena ada tugas ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan adanya LRT, dapat menekan biaya perjalanan saya jadi lebih murah dibandingkan harus menggunakan kendaraan umum dan mobil pribadi. Harga tiket LRT ke bandara sangat murah, Rp10.000 dari stasiun bandara hingga stasiun Jakabaring. Fasilitasnya nyaman dan keamanannya lebih terjamin. ”

Imron
Wiraswasta, Tinggal di Jakabaring, Palembang,
Sumatera Selatan



Sumber: Biro Perencanaan Kemenko Bidang Kemaritiman



Sail Indonesia



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman

Demi mewujudkan Indonesia yang optimal dalam mengelola lautnya, pemerintah melaksanakan kegiatan tahunan berskala internasional yang diberi nama Sail Indonesia. Tujuan dari pelaksanaan sail tersebut adalah mengembangkan sektor pariwisata, terutama wisata bahari di daerah yang menjadi lintasan dan pusat Sail Indonesia. Sejak tahun 2009 hingga 2018, telah dilaksanakan sebanyak 10 kali, dari Sail Bunaken di tahun 2009 hingga Sail Moyo Tambora pada tahun 2018.

Pelaksanaan Sail 2009-2018

Tahun	Nama Sail	Provinsi	Waktu
2009	Sail Bunaken	Sulawesi Utara	12-19 Agustus
2010	Sail Banda	Maluku	12 Juli – 8 Agustus
2011	Sail Wakatobi-Belitong	Sulteng-Babel	Juli-Agustus
2012	Sal Morotai	Maluku Utara	Juni-September
2013	Sail Komodo	Nusa Tenggara Timur	27 Juli-14 September
2014	Sail Raja Ampat	Papua Barat	17-23 Agustus
2015	Sail Tomini	Sulawesi Tengah	10-19 September
2016	Sail Karimata	Kalimantan Barat	Juli-Desember
2017	Sail Sabang	Aceh	28 November – 5 Desember
2018	Sail Moyo Tambora	Nusa Tenggara Barat	9-23 September



Sail Bunaken

Bertempat di Kota Manado dan Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sail Bunaken dilaksanakan pada tanggal 12-19 Agustus 2009. Agenda utama kegiatan ini adalah International Fleet Review 2009 (IFR 2009). Kegiatan ini menghadirkan kapal-kapal perang dan kapal-kapal layer tinggi dari masing-masing angkatan laut sebanyak 30 negara sahabat. Sail ini memecahkan rekor dunia selam massal yang pernah dicatat di Maladewa pada tahun 2007. Sebanyak 2.657 penyelam menyelam bersama di pantai Malalayang, Teluk Manado dalam rangka upacara bendera di bawah air memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2009.



Sail Banda

Merupakan suatu rangkaian kegiatan bahari yang bertujuan untuk menjadikan Maluku sebagai 'Gerbang Timur' Indonesia, menciptakan lomba layar yang terbaik, membangun potensi kelautan dan perikanan serta promosi pariwisata di wilayah Maluku. Pada pelaksanaannya, Sail Banda yang dilaksanakan mulai dari 12 Juli hingga 8 Agustus 2010 memperkenalkan spot atau lokasi kunjungan wisata ke Kota Ambon yang dianggap didatangi para wisatawan. Terdiri dari wisata pantai maupun wisata bawah laut.



Sail Wakatobi

Mengambil tema "*Clean the Ocean for Future Live*", Sail Banda dilaksanakan pada Juli hingga pekan keempat Agustus tahun 2011. Sail ini bertujuan untuk menggalang keterpaduan dalam pemanfaatan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan Wakatobi dan Bangka Belitung sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional, menciptakan *The Best Sailing Passage*, menjadikan potensi kelautan dan perikanan di Wakatobi dan Bangka Belitung sebagai sumber pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Sail Morotai

Pulau Morotai terletak di lokasi strategis yang langsung berbatasan dengan Samudera Pasifik dan memiliki peran sebagai gerbang bagi negara-negara Pasifik. Itu sebabnya, Sail Morotai 2012 mengambil tema "Menuju era Baru Ekonomi Regional Pasifik" yang memiliki arti bahwa perekonomian global akan mulai bergeser menuju kawasan Pasifik. Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara itu memiliki keragaman flora dan fauna serta menjadi tempat bersejarah pada Perang Dunia II.



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman



Sail Komodo

Pada tahun 2013, kegiatan bahari tingkat internasional yang dilaksanakan adalah Sail Komodo. Dilaksanakan sejak 27 Juli hingga 14 September 2013, sail ini mengambil tema “Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur Menjadi Destinasi Pariwisata Dunia”. Ikon hewan endemik Komodo yang juga menjadi nama pulau ini menjadi daya tarik tersendiri dalam perhelatan tersebut. Dalam sail ini pula, Pulau Komodo juga didaulat menjadi *The 7 New Wonders*.



Sail Raja Ampat

Pelaksanaan Sail Raja Ampat 2014 menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta wisata bahari. Acara puncak sail ini dimeriahkan oleh atraksi laut dari kapal perang Indonesia dan negara sahabat hingga kapal hias nelayan. Para wisatawan lokal, mancanegara, dan warga setempat pun terpukau dengan beragam atraksi yang disajikan. Para warga lokal berharap, acara serupa dapat digelar kembali di wilayah yang dikenal begitu indah tersebut.



Sail Tomini

Sejumlah acara digelar dalam Sail Tomini yang puncaknya berlangsung pada 19 September 2015 di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Antara lain Gebyar Batik Tomini, Lomba Perahu Naga, Pameran Potensi Daerah, Seminar Nasional dan Internasional, dan Rali Kapal Layar. Sail Tomini mengambil tema “Mutiara Khatulistiwa untuk Kehidupan Masa Depan”. Teluk Tomini tempat berlangsungnya sail dikenal dengan keelokan bawah lautnya yang mengagumkan. Tujuan utama sail ini adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi di provinsi dan kabupaten setempat.



Sumber: Humas Kemenko Bidang KEMARITIMAN



Sail Karimata

Kawasan strategis di Selat Karimata yang begitu banyak memiliki potensi bahari menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang hadir dalam perhelatan Sail Karimata 2016. Selat tersebut menjadi satu-satunya Sail Indonesia yang diselenggarakan di empat provinsi, yakni Bangka Belitung, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Rangkaian kegiatan berlangsung dari Juli hingga Desember 2016 di empat provinsi tersebut dengan puncaknya diselenggarakan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.



Sail Sabang

Keputusan Menteri Koordinator Bidang KEMARITIMAN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Sabang 2017 menjadi dasar pelaksanaan Sail Sabang 2017. Sama dengan perhelatan sail sebelumnya, Sail Sabang juga fokus pada peningkatan wisata bahari Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Di Sail ini, segitiga emas antara Sabang, Phuket (Thailand), dan Lengkawi (Malaysia) digagas oleh Menteri Pariwisata ketiga negara. Menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata kelas dunia menjadi tujuan inti dari perhelatan acara puncak Sail Sabang 2017.



Sail Moyo Tambora

Sail Moyo Tambora 2018 sendiri merupakan sail ke 10 dari Rangkaian Sail Indonesia yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2009 di Bunaken. Perhelatan Sail Moyo Tambora yang berlangsung di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjadi sangat istimewa karena menjadi awal dari pemulihan pariwisata Lombok dan Sumbawa menyusul gempa yang menerpa NTB secara beruntun pada saat itu. Ringkasnya, Sail Moyo Tambora ini sebagai momentum mengobati, penyemangat, bahkan bangkitnya kebangkitan pariwisata Nusa Tenggara Barat pasca musibah gempa bumi di wilayah tersebut.



Sumber: Istimewa



Sumber: Istimewa



Sumber: Humas Kemenko Bidang Kemaritiman




Sumber: Istimewa



Sumber: Istimewa



A photograph of a sunset over the ocean. The sun is low on the horizon, creating a bright, vertical reflection on the water's surface. The sky is a mix of light blue and yellow, and the water is dark with shimmering highlights from the sun.

Sepanjang periode 2015-2018, program prioritas yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berjumlah cukup banyak. Kendati demikian, buku ini hanya mengulas 12 program prioritas yang dinilai menonjol dan memiliki dampak langsung pada kepentingan masyarakat.

Tentu saja, kehadiran buku ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan instansi lain yang terkait. Juga, kontribusi dari internal Kemenko Kemaritiman yang bahu-membahu menyajikan data-data sebagaimana telah disampaikan secara lengkap pada buku ini.

Narasi utama yang disampaikan dalam buku ini adalah kehadiran negara dalam mewujudkan pembangunan kemaritiman yang berdaulat, maju, mandiri, kuat yang berbasiskan kepentingan nasional. Di titik inilah, kesuksesan program prioritas merupakan tonggak penting dari perjalanan panjang Indonesia mengawal poros maritim dunia.

Penutup





Panorama Raja Ampat

Sumber: Deputi II Kemenko Bidang Kemaritiman (TS)

